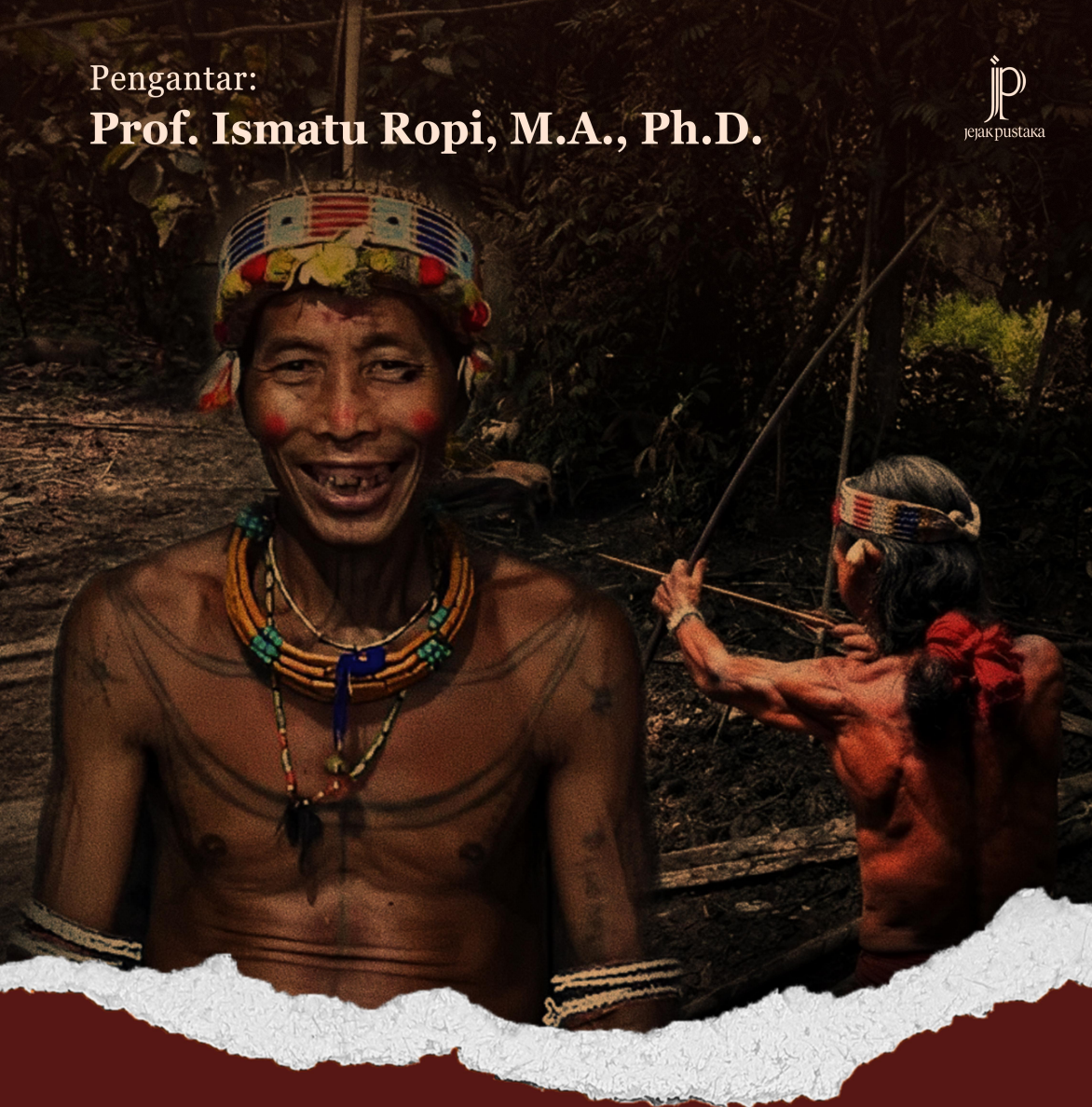


Pengantar:

Prof. Ismatu Ropi, M.A., Ph.D.



AGAMA YANG DIDESAK MENEPI

REKOGNISI ARAT SABULUNGAN DI MENTAWAI

Dwi Wahyuni

AGAMA YANG DIDESAK MENEPI

Rekognisi Arat Sabulungan di Mentawai

Dwi Wahyuni

Editor:
Karen Karista



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

LINGKUP HAK CIPTA

Pasal 1

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN PIDANA

Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4. 000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

AGAMA YANG DIDESAK MENEPI

Rekognisi Arat Sabulungan di Mentawai

Dwi Wahyuni

Editor:
Karen Karista



AGAMA YANG DIDESAK MENEPI

Rekognisi Arat Sabulungan di Mentawai

Penulis:
Dwi Wahyuni

Editor:
Karen Karista

All rights reserved
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Hak Penerbitan pada Jejak Pustaka

ISBN: 978-623-524-276-7

Tata Letak Isi:
Tim Jejak Pustaka
Desain Cover:
Tim Jejak Pustaka

xx + 87 hlm: 15,5 x 23 cm
Cetakan Pertama, Januari 2026

Penerbit
Jejak Pustaka
Anggota IKAPI No. 141/DIY/2021
Sekretariat Jejak Imaji, RT 04 Kepuhkulon, Wirokerten
Banguntapan Bantul Yogyakarta
jejakpustaka@gmail.com
081315458001

UCAPAN TERIMA KASIH

Buku ini merupakan hasil penelitian dan melibatkan banyak pikiran serta kemurahan hati. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2023 dan didanai oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Dukungan institusional tersebut tidak hanya memungkinkan penelitian berjalan secara akademik, tetapi juga memberi ruang bagi penulis dan tim untuk hadir lebih dekat dengan kehidupan masyarakat Mentawai yang menjadi pusat kajian buku ini.

Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada Rifai Lubis dari Yayasan Citra Mandiri Mentawai yang sejak awal menjadi jembatan penting antara peneliti dan masyarakat. Terima kasih juga kepada Nasrullah yang saat ini menjabat sebagai Ketua Bawaslu Mentawai, atas berbagai diskusi, bantuan lapangan, dan keterbukaan yang sangat berarti selama proses penelitian. Penghargaan yang sama penulis sampaikan kepada kanda-kanda KAHMI Mentawai serta Mas Bowo di Muara Siberut yang dengan caranya masing-masing turut memperlancar kerja penelitian di lapangan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada perangkat desa Matotonan dan seluruh masyarakat desa Matotonan yang telah menerima kehadiran penulis dan tim bukan sekadar sebagai peneliti, tetapi sebagai keluarga yang diperlakukan

dengan penuh kehangatan. Selama penelitian berlangsung, penulis dan tim tinggal di rumah Saharman, sebuah ruang yang tidak hanya menjadi tempat beristirahat, tetapi juga menjadi ruang belajar, berdiskusi, dan menyelami kehidupan sehari-hari masyarakat desa Matotonan. Untuk itu, rasa terima kasih yang mendalam penulis haturkan kepada Saharman dan keluarganya.

Ucapan terima kasih secara khusus juga penulis sampaikan kepada keluarga besar suku Siritoitet yang dengan keterbukaan dan kepercayaan telah berbagi cerita, pengalaman, serta pengetahuan leluhur yang menjadi fondasi penting dalam penulisan buku ini. Tanpa keterlibatan dan kepercayaan masyarakat, buku ini tidak akan pernah hadir sebagaimana adanya.

Penghargaan dan rasa hormat penulis sampaikan kepada Prof. Ismatu Ropi, MA., Ph.D. Guru Besar Studi Agama-Agama/Perbandingan Agama sekaligus Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang telah berkenan memberikan kata pengantar untuk buku ini. Kehadiran beliau memberikan bobot akademik sekaligus penguatan reflektif terhadap tema yang diangkat dalam buku ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Karen Karista, editor buku ini, yang telah bersedia membuka kembali draf naskah hasil penelitian yang sempat terbengkalai oleh waktu dan berbagai keterbatasan. Kehadirannya bukan sekadar

membantu merapikan bahasa dan alur penulisan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menghidupkan kembali naskah ini sebagai sebuah buku yang utuh.

Akhirnya, penulis ingin menutup ucapan terima kasih ini dengan menyebut dua nama yang menjadi sumber energi paling personal dalam seluruh proses penelitian dan penulisan buku ini, Intan dan Yusuf. Di sela-sela kerja lapangan, proses penulisan, dan perenungan akademik yang kerap melelahkan, kehadiran mereka menjadi pengingat bahwa pengetahuan tidak hanya lahir dari ruang akademik, tetapi juga tumbuh dari kesabaran dan harapan akan masa depan.

Semoga buku ini dapat menjadi bagian kecil dari upaya memahami, menghormati, dan merekognisi Arat Sabulungan sebagai warisan spiritual yang hidup dan bermartabat.

Padang, Januari 2026

Dwi Wahyuni

SEBUAH PENGANTAR SINGKAT

Menyingkap Lembaran Luka, Merawat Napas Identitas:

Arat Sabulungan dalam Pusaran Rekognisi

Prof. Ismatu Ropi, MA., Ph.D.

Guru Besar Studi Agama-Agama/Perbandingan Agama

Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Buku *Agama yang Didesak Menepi: Rekognisi Arat Sabulungan di Mentawai* karya Dwi Wahyuni merupakan kontribusi yang sangat penting bagi studi agama-agama di Indonesia, khususnya dalam upaya memahami dinamika agama leluhur di tengah tekanan negara dan dominasi agama-agama dunia. Dengan ketelitian akademik yang kuat dan kepekaan etnografis yang terjaga, buku ini tidak berhenti pada deskripsi tradisi keagamaan, tetapi mengajak pembaca menyelami pengalaman historis, sosial, dan batin masyarakat Mentawai yang selama puluhan tahun harus menegosiasikan identitas keagamaannya.

Argumen utama buku ini bertumpu pada penegasan bahwa Arat Sabulungan bukan sekadar adat atau warisan budaya, melainkan sebuah sistem religius yang utuh. Ia membentuk cara orang Mentawai memahami relasi antara manusia, alam, leluhur, dan dunia spiritual. Melalui penelusuran sejarah kolonial, kebijakan negara pascakemerdekaan, hingga praktik administrasi modern, penulis memperlihatkan bagaimana Arat Sabulungan secara sistematis dipinggirkan.

Kebijakan seperti Rapat Tiga Agama tahun 1954 dan berbagai bentuk ‘penertiban’ selanjutnya menempatkan agama leluhur ini dalam posisi ambigu. Ia tidak sepenuhnya dihapus, tetapi juga tidak pernah diberi ruang untuk hidup secara terbuka dan bermartabat.

Secara substantif, buku ini menyajikan eksplorasi yang komprehensif dan penuh empati terhadap kosmologi, spiritualitas, serta etika hidup masyarakat Mentawai. Dengan ketajaman analitis, Dwi Wahyuni memetakan tiga lapis tekanan yang dialami Arat Sabulungan. Pertama, ‘tekanan’ dari agama-agama dunia seperti Islam, Kristen, dan Katolik yang hadir melalui berbagai strategi, dari pendekatan kultural yang relatif akomodatif hingga keterlibatan dalam proyek penyeragaman atau fusi agama negara. Kedua, tekanan negara yang bersifat sistemik dan kerap destruktif, dimulai dari logika kolonial Belanda yang membelah dunia ke dalam kategori “primitif” dan “beradab”, memuncak dalam Rapat Tiga Agama 1954 dan Surat Keputusan Nomor 167 yang cukup represif, berlanjut pada pengawasan ketat Orde Baru melalui definisi agama yang sempit, dan menyisakan problem implementasi di era Reformasi. Ketiga, tekanan modernitas dan perubahan sosio-ekologis yang menggerus ruang hidup fisik sekaligus spiritual masyarakat Mentawai.

Namun, kekuatan utama buku ini justru terletak pada kemampuannya melampaui narasi korban yang pasif. Penulis

dengan sangat meyakinkan mengangkat apa yang ia sebut sebagai strategi bertahan hidup komunitas Mentawai, yakni strategi “menepi”. Menepi di sini bukan tanda kekalahan atau kepasrahan, melainkan sebuah ‘perlawanan diam’ (silent opposition) yang cerdas dan penuh kehati-hatian. Ia menjadi ruang negosiasi yang melahirkan identitas berlapis. Masyarakat Mentawai belajar hidup dalam dualitas: secara administratif tercatat sebagai Muslim, Kristen, atau Katolik, tetapi dalam praktik keseharian tetap memelihara Arat Sabulungan melalui ritual penyembuhan, penghormatan terhadap keikei atau pantangan, relasi dengan Sikerei, serta hubungan sakral dengan hutan. Buku ini menunjukkan dengan jelas bahwa Arat Sabulungan tidak pernah punah. Ia hanya berpindah dari ruang publik yang dibakar ke ruang privat yang dirawat, dari uma yang dirubuhkan ke ingatan kolektif yang dijaga, sambil menunggu waktu untuk kembali bernapas lega dan berdiri tegak.

Kerangka analisis rekognisi yang digunakan menjadi keunggulan lain buku ini. Dengan memanfaatkan teori Axel Honneth tentang cinta, hak, dan solidaritas, Dwi Wahyuni memperlihatkan bahwa persoalan Arat Sabulungan tidak dapat direduksi pada pengakuan hukum atau administratif semata. Rekognisi dipahami sebagai pengalaman hidup yang menyentuh rasa aman, harga diri, dan martabat. Dalam kerangka ini, kehidupan berlapis masyarakat Mentawai tampil sebagai respons kreatif atas ketidakadilan struktural. Strategi menepi

tidak dibaca sebagai kegagalan, melainkan sebagai bentuk ketahanan yang rasional dan bermakna.

Buku ini juga secara meyakinkan memetakan relasi antara Arat Sabulungan, agama-agama dunia, dan negara secara lebih bernuansa. Islam, Kristen, dan Katolik tidak digambarkan secara simplistik sebagai kekuatan penindas, melainkan sebagai tradisi yang juga dinegosiasikan secara kreatif oleh masyarakat lokal. Dalam banyak kasus, terjadi perjumpaan yang tidak sepenuhnya meniadakan, tetapi saling bersinggungan dan membentuk identitas keagamaan yang kompleks. Analisis ini memperkaya wacana studi agama dengan menunjukkan bahwa keberagamaan di tingkat lokal sering kali jauh lebih cair dan praksis dibandingkan kategori resmi yang dibakukan negara.

Sebagai karya akademik, buku ini sangat layak dijadikan rujukan utama dalam pengajaran studi agama-agama. Pertama, ia merupakan contoh kuat pendekatan metodologis dalam kajian agama lokal. Penelitian etnografis dengan observasi partisipatif yang intensif di Desa Matotonan berhasil menangkap nuansa emosi, dilema, dan strategi halus yang kerap luput dari pendekatan kuantitatif. Subjek penelitian tidak diperlakukan sebagai objek bisu, tetapi sebagai aktor dengan suara dan agensi. Kedua, buku ini kaya sebagai materi ajar untuk mata kuliah Sosiologi Agama, Antropologi Agama, Politik Agama di Indonesia, dan Studi Agama-Agama Indigenous. Ia menawarkan studi kasus konkret tentang relasi kuasa,

resistensi, identitas hibrid, dan konstruksi kategori “agama” itu sendiri. Ketiga, secara epistemologis, buku ini menjadi koreksi penting atas kecenderungan studi agama yang terlalu terpaku pada definisi baku dan abai terhadap pengalaman keagamaan yang hidup.

Lebih dari itu, buku ini penting dibaca oleh masyarakat luas dan para pengambil kebijakan. Ia mengingatkan kita bahwa pengakuan terhadap agama leluhur bukan sekadar soal kolom agama dalam dokumen kependudukan, melainkan menyangkut penghormatan terhadap martabat manusia dan ingatan kolektif sebuah komunitas. Dalam konteks Indonesia yang majemuk, karya ini hadir sebagai suara yang jernih dan bernas tentang bagaimana negara seharusnya belajar menghormati perbedaan.

Karya Dwi Wahyuni juga memberi pelajaran penting tentang ketahanan budaya dan etika ekologis. Ajaran Arat Sabulungan mengenai keseimbangan antara manusia, alam, dan roh leluhur terasa sangat relevan di tengah krisis ekologi global. Buku ini mengingatkan bahwa modernisasi tanpa rekognisi terhadap kosmologi lokal berpotensi menjadi bentuk kekerasan baru, dan bahwa keberagaman spiritual bangsa ini adalah kekayaan yang tidak ternilai.

Sebagai karya seorang dosen muda, buku ini menunjukkan kedewasaan intelektual dan keberanian akademik yang patut diapresiasi. Ia kokoh secara teoritis, kaya secara empiris, dan relevan secara sosial. Agama yang Didesak Menepi bukan hanya

menambah khazanah keilmuan, tetapi juga mengajak kita meninjau ulang cara memahami agama, pengakuan, dan keadilan dalam kehidupan bersama.

PENGANTAR PENULIS

Arat Sabulungan merupakan napas lama yang membentuk cara orang Mentawai memahami dunia. Cara mereka membaca alam, menjaga keseimbangan, dan menghormati roh leluhur. Namun ketika agama-agama dunia masuk ke kepulauan Mentawai, terutama sejak pertengahan abad ke-20, perjumpaan tersebut menyisakan luka yang panjang. Banyak orang Mentawai memilih untuk tidak lagi menampilkan identitas agama leluhur mereka. Mereka beralih ke Islam, Kristen, atau Katolik, dengan tetap membawa nilai-nilai Arat Sabulungan dalam kehidupan sehari-hari, dalam pantangan yang mereka patuhi, dalam penyembuhan yang mereka cari, dan dalam relasi mereka dengan hutan yang dianggap hidup sebagaimana mereka sendiri.

Perubahan besar terjadi ketika agama *sasareu* (agama orang luar) makin intensif hadir dengan intervensi negara. Negara melalui Rapat Tiga Agama pada tahun 1954, memberi ultimatum kepada masyarakat Mentawai untuk meninggalkan Arat Sabulungan dan memilih salah satu dari dua agama resmi saat itu, Islam atau Kristen. Bagi pemerintah, agama leluhur dianggap tidak sesuai dengan gambaran modernitas. Bagi masyarakat, kebijakan itu menjadi titik mula dari ketakutan yang menghantui keseharian mereka. Melalui SK Nomor

167/PROMOSI/1954, negara mengawasi, membatasi, dan melarang praktik-praktik Arat Sabulungan.

Ketakutan yang mengiringi masa itu masih hidup dalam ingatan para tetua. Suara sepatu bot aparat yang menginjak tanah basah, nyala api yang melahap alat-alat ritual di uma, dan teriakan memaksa yang datang dengan bahasa yang bukan milik mereka. Menyuruh orang Mentawai memilih agama yang telah ditentukan negara.

Pada masa itu, identitas menjadi sesuatu yang harus disembunyikan. Sikerei menanggalkan simbolnya, menunda ritual, dan menyembunyikan roh para leluhur agar tidak ikut musnah dalam penertiban. Masyarakat belajar memisahkan diri mereka menjadi dua wajah di hadapan negara. Satu wajah yang dicatat dalam data kependudukan sebagai Muslim, Kristen, atau Katolik, dan satu wajah lain yang mengalir dalam napas sehari-hari, dalam tabu, dalam punen, dalam penyembuhan, dan dalam relasi intim dengan hutan yang menjadi ruang hidup bagi manusia maupun roh-roh yang mereka hormati.

Menepi adalah strategi diam dari seseorang yang mengetahui bahwa ruang hidupnya tengah dikecilkan. Menepi merupakan cara bertahan dari tekanan kebijakan negara, mulai dari SK No. 167/PM/1954 hingga razia aparat bersenjata yang menempatkan Arat Sabulungan dalam posisi serba salah. Menjadi agama yang tidak boleh mati, tetapi juga tidak boleh hidup. Arat Sabulungan mesti ada sebagai identitas kultural

Mentawai, namun tidak boleh tampak sebagai agama yang mandiri. Boleh menjadi latar, tetapi tidak boleh menjadi pusat.

Rasa takut yang tidak pernah benar-benar padam setiap kali aparat memasuki kampung, kewajiban pindah ke Barasi yang mengubah pola hidup, keputusan memindahkan ritual ke ruang gelap, dan bagaimana langkah kaki harus diperhitungkan agar tidak dianggap melanggar ajaran agama dunia. Trauma itu merambat dari generasi ke generasi, membentuk kesadaran bahwa identitas leluhur harus disesuaikan dengan kehadiran negara yang kehadirannya tidak selalu ramah.

Namun sejarah Arat Sabulungan tidak hanya dipenuhi cerita tentang ketertindasan, juga menyimpan catatan kecakapan masyarakat desa Matotonan dalam menegosiasikan ruang hidupnya. Islam datang melalui dakwah yang lembut dan Katolik melalui strategi inkulturasi gereja yang lebih akomodatif. Masyarakat tidak pernah sepenuhnya meninggalkan Arat Sabulungan. Mereka menciptakan identitas yang berlapis-lapis. Muslim administratif yang tetap makan babi, Katolik yang tetap mengandalkan ritual Sikerei ketika sakit, dan pejabat desa yang tetap tunduk pada tabu keikei ketika menghadapi persoalan komunal.

Dalam kerangka ini, menepi bukan sekadar kondisi geografis masyarakat yang tinggal di pedalaman Siberut, melainkan metafora politik. Sebuah proses penyingkiran yang berjalan perlahan, melalui regulasi, narasi agama resmi, dan

logika negara. Tetapi menepi juga adalah pilihan taktis, sebuah cara strategis yang diam-diam menyelamatkan Arat Sabulungan pada masa-masa ketika tidak boleh diucapkan. Ada kekuatan di sana, kekuatan yang tidak berisik. Kekuatan yang tumbuh dari kehendak untuk tetap hidup, meski ruang hidupnya disempitkan.

Buku ini dibuka dari kesunyian itu. Dari uma yang pernah dibakar, hingga uma yang kini kembali dibangun oleh pemerintah desa sebagai simbol kebangkitan. Dari ritual yang dulu dilakukan dalam gelap, hingga punen yang sekarang dilaksanakan dengan bangga dan terbuka, dihadiri anak-anak muda yang mulai belajar makna leluhur mereka. Dari ketakutan yang mengendap dalam tubuh, menuju rekognisi yang kini diperjuangkan sebagai hak.

Karena kisah Arat Sabulungan adalah kisah tentang sebuah agama yang didesak menepi, namun tidak pernah benar-benar hilang. Arat Sabulungan menepi untuk bertahan hidup, menepi untuk menjaga martabat, menepi untuk menunggu waktu di mana dapat berbicara kembali. Arat Sabulungan menepi bukan sebagai tanda kalah, tetapi sebagai penanda bahwa negara belum sepenuhnya mengerti cara menghormati yang berbeda.

Dan inilah cerita tentang bagaimana sebuah komunitas membangun martabatnya kembali, melalui hubungan cinta, hukum, dan solidaritas. Sebagaimana dibaca melalui teori rekognisi Axel Honneth yang menjadi dasar analisis dalam buku

ini. Teori yang membantu melihat bahwa pengakuan bukan hanya soal administrasi atau kebijakan, tetapi persoalan penghargaan terhadap martabat manusia. Bagaimana seseorang merasa dihargai, diakui, dan dianggap layak untuk berada di dunia.

Dari tepi itu, Arat Sabulungan kini perlahan melangkah ke tengah, bukan untuk menantang, tetapi untuk diakui sebagai ajaran leluhur, sebagai agama yang hidup, sebagai subjek yang bermartabat. Begitulah buku ini dimulai. Dari sebuah tepi yang tidak pernah benar-benar sunyi.

DAFTAR ISI

UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
SEBUAH PENGANTAR SINGKAT.....	viii
PENGANTAR PENULIS.....	xiv
DAFTAR ISI	xix
MEMBACA AGAMA DARI TEPI.....	1
Dilema Rekognisi Agama Leluhur	1
Menimbang Makna Rekognisi.....	4
Peta Kajian tentang Agama Leluhur di Mentawai	6
Kerangka Membaca Agama dari Tepi.....	13
Metode Membaca Agama dari Tepi.....	18
ARAT SABULUNGAN DAN AGAMA DUNIA.....	22
Arat Sabulungan	22
Islam di Mentawai.....	32
Kristen di Mentawai.....	36
Katolik di Mentawai.....	40
Perjumpaan Arat Sabulungan dan Agama Dunia.....	43
Bertemu Tanpa Menguasai.....	46
ARAT SABULUNGAN DAN NEGARA.....	48
Kolonialisme dan Penataan Agama	48
Awal Indonesia Merdeka.....	50
Orde Lama dan Orde Baru	54
Era Reformasi	57
Bertahan di Tengah Aturan dan Larangan.....	60

REKOGNISI INTERSUBJEKTIF ARAT SABULUNGAN

DI MENTAWAI.....63

 Rekognisi sebagai Proses yang Terus Bergerak.....63

 Rekognisi yang Bertumbuh dari Keluarga dan Ingatan Kolektif.....66

 Rekognisi Menjelma Menjadi Aturan yang Melindungi.....69

 Rekognisi Tumbuh Melalui Kebersamaan72

 Rekognisi sebagai Konstruksi Subjektivitas Kolektif75

PENUTUP78

DAFTAR PUSAKA81

MEMBACA AGAMA DARI TEPI

Dilema Rekognisi Agama Leluhur

Bagi masyarakat Mentawai, Arat Sabulungan bukan sekadar ajaran leluhur, tetapi juga sebagai cara pandang hidup yang membentuk hubungan manusia dengan sesama, alam, dan dunia supranatural. Dalam keseharian masyarakat Mentawai, nilai-nilai Arat Sabulungan tercermin dalam cara mereka menghormati hutan, mengelola pangan, mengobati penyakit, hingga membangun rumah dan menjalin relasi sosial. Meski demikian, perjalanan panjang Arat Sabulungan tidak selalu berlangsung mulus. Sejak pertengahan abad ke-20, agama leluhur ini menghadapi berbagai tekanan, terutama setelah hadirnya agama-agama dunia seperti Islam, Kristen, dan Katolik ke Mentawai.

Pertemuan tersebut meninggalkan jejak yang dalam. Banyak orang Mentawai memilih untuk tidak lagi menampilkan identitas agama leluhurnya secara terang-terangan. Mereka beralih ke agama-agama resmi yang diakui negara, namun tetap

mempraktikkan ajaran Arat Sabulungan dalam kehidupan sehari-hari (Delfi, 2013; Panjaitan, 2017; Reeves, 1999). Fenomena ini memperlihatkan adanya dinamika spiritual yang unik. Komunitas yang tampil sebagai Muslim, Kristen, atau Katolik dalam catatan administratif negara, tetapi hatinya masih tertambat pada nilai-nilai Arat Sabulungan.

Kedatangan agama-agama dari luar Mentawai tidak dapat dipisahkan dari proyek modernisasi negara (Delfi, 2013; Glossanto, 2019; Markus, 2016). Pada tahun 1954, pemerintah memprakarsai apa yang dikenal sebagai Rapat Tiga Agama, sebuah kebijakan yang pada dasarnya memberi ultimatum kepada masyarakat Mentawai untuk memilih salah satu dari dua agama resmi waktu itu, Islam atau Kristen. Melalui SK No. 167/1954, negara juga mengawasi dan membatasi keberadaan berbagai bentuk kepercayaan yang dianggap tidak sesuai dengan standar keagamaan yang dirumuskan pemerintah (Yulia et al., 2018). Dalam konteks Mentawai, Arat Sabulungan termasuk dalam kelompok yang harus ditertibkan.

Kebijakan tersebut membawa dampak besar. Banyak uma, rumah komunal yang menjadi pusat pelaksanaan ritual Arat Sabulungan, dirubuhkan. Peralatan adat dan benda-benda keramat dibakar. Beberapa masyarakat dipaksa pindah ke permukiman yang dibangun pemerintah. Bahkan, praktik ritual Arat Sabulungan terpaksa dilakukan secara sembunyi-sembunyi demi menghindari ancaman dan intimidasi. Cerita-cerita

tentang polisi bersenjata yang datang ke desa, membakar perlengkapan ritual, dan membawa warga untuk kerja paksa, masih membekas dalam ingatan generasi tua Mentawai (Febrianti, 2021).

Perlakuan semacam itu meninggalkan trauma yang tidak hilang begitu saja. Pengawasan negara, larangan berpraktik, dan penilaian negatif terhadap agama leluhur membuat sebagian masyarakat memilih diam, menyembunyikan keyakinannya sebagai bentuk perlindungan diri (Wahyuni et al., 2024). Meski demikian, Arat Sabulungan tidak pernah benar-benar lenyap. Arat Sabulungan terus hidup dalam ritual penyembuhan, larangan-larangan adat (*keikei*), hubungan dengan sikerei, dan penghormatan terhadap alam yang secara turun-temurun dijaga oleh masyarakat Mentawai (Wahyuni et al., 2025).

Perubahan baru muncul ketika negara mulai mengakui hak-hak penghayat kepercayaan melalui Undang-Undang Administrasi Kependudukan pada tahun 2006. Kebijakan tersebut memberi ruang bagi penghayat agama leluhur untuk masuk dalam sistem administrasi negara, meskipun kolom agama dalam dokumen kependudukan mereka tetap dibiarkan kosong. Barulah setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, penghayat agama leluhur memiliki peluang lebih konkret untuk menampilkan identitasnya secara lebih jujur dalam dokumen resmi negara.

Namun pertanyaan-pertanyaan penting segera muncul. Apakah pengakuan administratif yang diberikan negara benar-benar mampu mencerminkan rekognisi atas identitas spiritual yang selama puluhan tahun dipinggirkan? Apakah sebuah kolom pada dokumen resmi, atau sebuah keputusan hukum, cukup untuk menghapus jejak panjang tekanan dan ketakutan yang pernah dialami para penghayat Arat Sabulungan? Hingga hari ini, meskipun peluang untuk mendaftarkan Arat Sabulungan sebagai kepercayaan sudah terbuka lebar, masyarakat Mentawai belum mengambil langkah itu. Ada keraguan yang sulit diurai, semacam kehati-hatian yang lahir dari pengalaman historis, dan juga perasaan bahwa mengungkap jati diri spiritual tidak selalu aman atau mudah dalam ruang sosial dan politik yang terus berubah.

Menimbang Makna Rekognisi

Situasi ini memperlihatkan persoalan yang lebih dalam. Banyak orang Mentawai memilih tampil sebagai pemeluk agama dunia (Islam, Kristen, atau Katolik) dalam catatan negara, tetapi kehidupan mereka sehari-hari tetap berpegang dengan nilai dan praktik Arat Sabulungan. Mereka memanggil sikerei ketika sakit, menghormati pantangan, merawat hubungan dengan alam, dan menjalankan ritual-ritual yang diwarisi leluhur. Ketegangan antara identitas yang ditampilkan dan identitas yang dijalani inilah yang menuntun pada pertanyaan besar yang menjadi

fondasi buku ini: bagaimana sebenarnya rekognisi terhadap Arat Sabulungan berlangsung? dan dalam bentuk apa rekognisi itu hadir dalam kehidupan masyarakat Mentawai?

Buku ini hadir untuk menelusuri pertanyaan tersebut melalui pandangan yang lebih dekat terhadap pengalaman masyarakat. Fokusnya bukan hanya pada bagaimana negara mengakui, membatasi, atau mengatur, tetapi juga bagaimana agama-agama dunia berinteraksi dengan Arat Sabulungan, serta bagaimana masyarakat Mentawai sendiri memahami dan menegosiasikan identitas leluhurnya. Pendekatan antropologis dan studi agama digunakan untuk melihat rekognisi ini bukan sekadar sebagai isu hukum, tetapi sebagai dinamika yang hidup dalam hubungan sehari-hari, dalam cara orang menghargai satu sama lain, dalam upaya menjaga martabat, dan dalam solidaritas sosial yang mengikat komunitas.

Dengan melihat rekognisi melalui ranah relasi intim dalam keluarga, perlindungan negara terhadap hak-hak spiritual, dan dukungan komunitas yang lebih luas, buku ini berusaha menampilkan gambaran tentang bagaimana Arat Sabulungan tetap bertahan dan menemukan ruang hidupnya. Ini bukan hanya cerita tentang apakah suatu agama diakui atau tidak, tetapi tentang bagaimana orang Mentawai menghidupi keyakinannya dalam ruang-ruang yang terkadang tampak samar, tersembunyi, atau dinegosiasikan terus-menerus.

Buku ini tidak hanya menyajikan sejarah atau deskripsi kebudayaan, tetapi menghadirkan sebuah analisis tentang bagaimana rekognisi terhadap Arat Sabulungan terbentuk, dipertahankan, dan dinegosiasikan. Ini adalah upaya untuk memahami bukan hanya apa yang tampak di permukaan, tetapi juga apa yang dirasakan, diingat, disembunyikan, dan dirayakan dalam kehidupan spiritual yang terus bergerak di bawah bayang-bayang sejarah panjang hubungan antara agama leluhur, agama dunia, dan negara.

Peta Kajian tentang Agama Leluhur di Mentawai

Berbagai kajian sebelumnya memang telah menyinggung banyak aspek kehidupan Mentawai. Mulai interaksi Islam dan Arat Sabulungan, praktik-praktik budaya dan pendidikan adat, hubungan manusia dan roh, hingga cara masyarakat membaca tanda-tanda alam. Namun sebagian besar kajian tersebut berhenti pada permukaan budaya dan ritual. Belum banyak penelitian yang secara langsung menyoroti bagaimana rekognisi bekerja sebagai pengalaman sosial, politis, dan spiritual yang memengaruhi cara orang Mentawai menjalani hidup sebagai pemeluk agama dunia sekaligus pewaris ajaran leluhur. Kekosongan inilah yang ingin diisi oleh buku ini.

Studi tentang Arat Sabulungan telah banyak dilakukan. Secara umum studi tersebut mencakup sedikitnya dua tema besar yakni; pertama studi Islam dan Arat Sabulungan dan

kedua mengenai studi eksistensi Arat Sabulungan pada masa modern. Studi Islam dan Arat Sabulungan terlihat misalnya pada hasil studi Delfi (2012, 2013, 2017) membahas tentang dampak adaptasi agama resmi terhadap masyarakat lokal di Mentawai. Hasil yang ditemukan dalam studi Delfi adalah menjelaskan dampak yang disebabkan oleh pembauran sebuah budaya atau agama di Mentawai dalam beberapa waktu. Bagi Sipuisilam Mentawai, menghindari babi hutan pada umumnya bertentangan dengan sifat babi hutan itu sendiri. Begitu pula konsumsi daging babi hutan dalam praktik ritual dan kehidupan sehari-hari Mentawai sehingga tidak memelihara dan memakan babi hutan bertentangan dengan pandangan orang Mentawai. Mengatakan bahwa babi hutan itu kotor atau haram, dianggap oleh orang Mentawai sebagai sebuah penghinaan terhadap keberadaan dan penciptaan hewan tersebut. Dalam pandangan orang Mentawai, menghina bisa membahayakan eksistensi identitas Mentawai.

Studi Kurniawan (2019) membahas tentang nilai budaya dan dinamika kehidupan masyarakat Mentawai yang dapat meredakan konflik antar kelompok. Hasil yang ditemukan adalah terdapat nilai kebersamaan yakni dalam wujud gotong royong yang masih diterapkan dalam membangun tempat tinggal, juga adanya transportasi air yang menjadi salah satu media untuk melakukan kontak sosial dan perkawinan antar kelompok yang dipraktekkan serta memberikan hukuman yang

berat bagi mereka yang melakukan pembunuhan guna untuk meminimalisir terjadinya konflik.

Studi Rozi & Taufik (2020) membahas tentang adaptasi dan strategi bertahan hidup masyarakat lokal di Indonesia terhadap tekanan non alamiah kepada alam dan nilai kearifan lokal yang dianut dalam melestarikan lingkungan. Komunitas lokal yang dipilih dalam studi Rozi dan Taufik adalah suku Mentawai, masyarakat lereng Gunung Merapi dan masyarakat Bali. Hasil yang ditemukan adalah adaptasi dan strategi yang dilakukan oleh masyarakat lokal beragam dan memiliki implikasi pengetahuan berbeda. Suku Mentawai dalam mempertahankan tradisi Arat Sabulungan dan masyarakat Bali dalam merevitalisasi Wariga dapat menyesuaikan dan beradaptasi dengan baik dan berhadapan dengan siklus lingkungan alamiah dan penetrasi non alamiah. Hal tersebut dapat terjadi disebabkan penerapannya lebih fleksibel, praktis, dan bersifat intelektual. Sementara kasus masyarakat lokal di lereng Merapi yang memiliki kearifan lokal dalam bentuk ajaran kosmologi dalam penanganan bencana, cenderung mengedepankan keimanan yang lebih berakar pada mitos daripada pengetahuan yang berhubungan dengan dunia objektif. Karena itu, ketika perangkat pengetahuan kearifan lokal berjuang untuk melampaui status yang terpinggirkan, dua kasus komunitas Mentawai dan Bali bisa menjadi persuasif dan

adaptif, sementara komunitas lokal lereng Merapi lebih sukar untuk beradaptasi.

Studi Wirman et al., (2021) membahas tentang negosiasi budaya yang dilakukan oleh da'i Islam terhadap tradisi lokalitas di Mentawai. Studi Wirman menggunakan pendekatan kualitatif yang mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan studi pustaka serta menggunakan analisis Miles dan Huberman dalam melakukan analisis data. Hasil yang ditemukan adalah strategi yang digunakan para pendakwah Islam khususnya dalam merekayasa generasi tua dan masyarakat adat yang memegang teguh nilai-nilai Arat Sabulungan yakni menggunakan pola sinkretis yang dinilai sedikit ekstrim. "*Son da'i bapak sikerei*" merupakan bentuk ekstrem yang ditemukan dalam melihat fenomena sinkretisme di kalangan generasi tua minoritas Muslim Mentawai. Pola ini dinilai lebih optimal dalam mempertahankan entitas Muslim Mentawai pada segmen generasi tua dan elite pribumi.

Sementara studi eksistensi Arat Sabulungan pada masa modern terlihat misalnya pada hasil studi, studi Yulia et al., (2018) membahas tentang kontroversi yang terjadi antara pemerintah daerah dengan masyarakat Mentawai yang masih menjalankan tradisi Arat Sabulungan. Studi Yulia menggunakan pendekatan kualitatif etnografi. Pengumpulan data dalam studi ini dilakukan melalui wawancara dan observasi kemudian dianalisis dengan melakukan reduksi data terlebih dahulu,

selanjutnya menganalisis dan terakhir melakukan verifikasi. Hasil yang didapatkan adalah penghapusan tradisi Arat Sabulungan merupakan bentuk paksaan dari pemerintah. Meskipun telah dipaksa untuk meninggalkan kepercayaan tersebut, masyarakat adat di Kepulauan Mentawai masih aktif menjalankan tradisi Arat Sabulungan dalam adat budaya, ritual, dan seremonial. Masyarakat adat Mentawai sejak tetap menjalankan prinsip hidup berdasarkan keyakinan yang dianut Arat Sabulungan. Sampai saat ini, belum ada sistem hukum adat baru yang mampu menggantikan kedudukan Arat Sabulungan yang selama ini mereka junjung tinggi. Mereka masih beranggapan bahwa tradisi Arat Sabulungan adalah sebuah sistem kepercayaan; dan prinsip-prinsip tradisi masih relevan dengan budaya dan cita-cita hukum masyarakat Mentawai.

Studi Yulia et al., (2019) membahas tentang nilai-nilai pendidikan yang terkandung pada tradisi Arat Sabulungan di Desa Matotonan Mentawai. Studi Yulia merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan etnografi, sejarah dan holistik. Hasil yang ditemukan adalah terdapat beberapa nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam tradisi Arat Sabulungan masyarakat Mentawai diantaranya; (i) rasa syukur terhadap anugerah Tuhan, (ii) mencintai semua makhluk Tuhan, (iii) mandiri, jujur, dan bertanggung jawab, (iv) peduli sesama, taat aturan dan norma, (v) disiplin dan pekerja keras, (vi)

bersikap baik, rendah hati, hormat, dan sopan, dan (vii) ramah dan membawa kebahagiaan.

Studi Krissandi et al., (2019) membahas tentang cara pandang posthuman masyarakat Mentawai terhadap kepercayaan Arat Sabulungan. Studi Krissandi menggunakan pendekatan deskriptif, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan sikerei dan masyarakat Mentawai. Hasil yang ditemukan adalah roh atau arwah memiliki derajat yang sama dengan manusia pada dalam ajaran Arat Sabulungan. Berbagai situasi, orang Mentawai meminta pendapat roh untuk mengambil keputusan. sikerei dianggap memiliki kemampuan melebihi batas manusia. Sistem pengobatan masyarakat Mentawai bergantung pada sikerei. sikerei dapat berbicara dengan roh dan dapat berbicara dengan tumbuhan yang akan menjadi obat. Alam: hewan dan tumbuhan dalam situasi tertentu menjadi rekan hidup manusia yang sederajat. *uma* dihormati sebagaimana ibu. *Tuddukat* dihormati sebagaimana anggota tubuh (mulut, telinga, dan hati).

Studi Tatubeket et al., (2019) membahas tentang peran alat musik dalam ritual Arat Sabulungan di kabupaten Mentawai. Studi Tatubeket menggunakan pendekatan emik untuk melihat lebih lanjut terkait struktur kognisi dan fungsi *tuddukat* bagi masyarakat Mentawai. Studi Ardhanari et al., (2021) membahas tentang strategi pemberdayaan terhadap masyarakat adat (khususnya masyarakat Mentawai).

Studi Ardhanari menggunakan pendekatan kualitatif dengan model fenomenologis. Data-data dalam studi ini diperoleh melalui wawancara secara mendalam, Focus Group Discussion (FGD) dan observasi terstruktur, lalu diolah menggunakan analisis tematik induktif setelah melalui proses validasi komunikatif dan argumentatif. Temuan adalah pemberdayaan masyarakat adat (khususnya masyarakat Mentawai) dilakukan menggunakan sistem kekerabatan setempat (*muntoghat*) yang disebut juga uma. Karena jumlah muntoghat yang besar, upaya pemberdayaan kemudian ditindaklanjuti dengan menggunakan sistem kekerabatan lokal yang lebih luas yang disebut antar uma. Tiap uma diberdayakan secara sosial, dan ekonomi setelah itu ditindaklanjuti dengan pelebagaan sosial dan yuridis, serta pengembangan jaringan, yang melibatkan pelaku bisnis, pemerintah, akademisi, dan lembaga independen lainnya.

Studi Hanani & Nelmaya, (2022) membahas tentang bentuk hubungan antara manusia, roh, dan alam dalam kepercayaan lokal masyarakat Mentawai (Arat Sabulungan). Studi Hanani & Nelmaya merupakan penelitian kualitatif. Data-data yang diperoleh dalam studi ini menggunakan teknik wawancara dan observasi, kemudian dianalisis menggunakan tiga tahap analisis yakni, reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan data. Hasil yang ditemukan adalah pada ajaran Arat Sabulungan, masyarakat Mentawai diajarkan untuk memperlakukan alam melalui teologi dan etika alamnya. Dengan

teologi ini, manusia dan lingkungannya menjaga dimensi yang seimbang. Jika keseimbangan dilanggar, maka penguasa atau makhluk halus akan marah, membawa malapetaka. Semua nasib buruk adalah manifestasi dari kemarahan dan kemurkaan roh-roh atas perlakuan buruk terhadap alam, yang tidak sesuai dengan teologi yang mereka anut.

Berdasarkan studi-studi yang telah dipetakan di atas menjelaskan banyak perspektif terkait Arat Sabulungan. Peta literatur menunjukkan pembahasan Arat Sabulungan dikategorikan dalam beberapa topik, yakni ritual keagamaan, akulturasi, adaptasi dan harmonisasi sosial, politik dan pendidikan. Namun belum teridentifikasi studi secara khusus mengkaji bagaimana bentuk rekognisi agama leluhur Arat Sabulungan di Mentawai.

Kerangka Membaca Agama dari Tepi

Untuk memahami perjalanan panjang Arat Sabulungan dalam hubungan yang rumit dengan negara, agama-agama dunia, dan kehidupan sosial masyarakat Mentawai. Diperlukan seperangkat kerangka teori yang tidak hanya kuat secara akademik, tetapi juga mampu membaca pengalaman manusia secara lebih intim. Kerangka teori dalam buku ini berfungsi seperti peta. Bukan untuk membatasi pandangan, tetapi untuk menuntun pembaca melihat pola-pola yang barangkali tidak tampak dalam pengamatan pertama. Dengan cara demikian,

teori menjadi alat untuk memahami bagaimana pengakuan atas identitas, atau ketiadaan pengakuan, membentuk kehidupan spiritual, sosial, dan bahkan psikologis masyarakat Mentawai.

Kerangka pertama diambil dari pemikiran Axel Honneth tentang rekognisi. Honneth berangkat dari satu gagasan mendasar bahwa manusia hanya dapat membangun hubungan yang sehat dengan dirinya sendiri jika ia diakui oleh orang lain. Rekognisi bagi Honneth, bukan sekadar penghargaan abstrak. Rekognisi hadir melalui pengalaman keseharian. Untuk menjelaskan hal ini, Honneth membagi rekognisi dalam tiga ranah: cinta, hak, dan solidaritas (Honneth, 2020). Dalam ranah cinta, seseorang merasa dirinya berharga karena mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari mereka yang terdekat. Di sinilah rasa percaya diri terbentuk. Pada ranah hak, negara mengakui individu sebagai subjek hukum yang memiliki hak yang sama dengan warga lainnya, di sini tumbuh rasa hormat terhadap diri sendiri. Adapun ranah solidaritas muncul ketika masyarakat luas menghargai kontribusi seseorang, sehingga melahirkan rasa harga diri (Arifin, 2019; Meitikasari & Drianus, 2021; Pariyatman et al., 2022; Prabowo, 2019; Runesi, 2015). Ketiga ranah ini memberi alat untuk memahami mengapa sebagian orang Mentawai merasa aman mempertahankan Arat Sabulungan dalam lingkup keluarga, tetapi mengurungkan diri ketika harus menampilkannya dalam ruang publik.

Pemikiran Honneth membantu melihat bahwa rekognisi bukan sekadar tindakan administratif. Rekognisi terkait langsung dengan bagaimana seseorang merasakan dirinya dihargai atau dipinggirkan. Dalam konteks Mentawai, rekognisi yang diberikan negara melalui kebijakan administrasi kependudukan belum tentu mampu menjangkau ranah emosional dan sosial yang lebih dalam. Jika suatu identitas masih memanggil kembali trauma historis atau jika masyarakat merasa bahwa pengakuan hanya hadir pada tataran formal, maka rekognisi itu belum tentu bermakna sepenuhnya. Gagasan ini memberikan landasan untuk membaca bagaimana masyarakat Mentawai mengolah pengalaman spiritual yang terbelah antara apa yang harus ditampilkan dan apa yang sebenarnya mereka jalani.

Kerangka kedua berasal dari pemikiran Samsul Maarif tentang politik agama di Indonesia. Maarif menunjukkan bahwa negara sejak awal tidak bersikap netral dalam urusan keagamaan (Maarif, 2017). Negara menentukan apa yang dianggap sebagai agama, siapa yang berhak menyandang status sebagai pemeluk agama yang sah, dan apa saja kriteria yang harus dipenuhi oleh sebuah keyakinan untuk masuk dalam kategori tersebut. Di titik inilah muncul persoalan mendasar. Kategori “agama resmi” bukanlah kategori teologis, tetapi kategori politis yang dibentuk berdasarkan kebutuhan negara. Dalam sejarah Indonesia, kategori ini kemudian menjadi alat

untuk merapikan keberagaman agama, mengatur kelompok minoritas, dan pada beberapa masa bahkan membatasi keyakinan yang tidak sesuai dengan bayangan modernitas nasional.

Pandangan Maarif memberi pemahaman bahwa rekognisi terhadap Arat Sabulungan tidak dapat dilepaskan dari kebijakan negara yang menempatkan agama leluhur sebagai sesuatu yang perlu ditertibkan, diarahkan, atau dipinggirkan. Ketika Arat Sabulungan dikeluarkan dari ruang publik dan didorong untuk digantikan oleh agama-agama besar, penghayat Arat Sabulungan bukan hanya kehilangan status hukum, tetapi juga kehilangan ruang untuk menegosiasikan martabat dan keberadaannya. Di sinilah hubungan antara rekognisi dan kekuasaan menjadi sangat penting. Rekognisi bukan hanya penghargaan moral, tetapi juga hasil dari kontestasi politik yang menentukan siapa yang memiliki ruang untuk muncul dan siapa yang harus bersembunyi.

Lensa ketiga mengenai kebebasan beragama. Kebebasan beragama harus dipahami dalam dua tingkatan, forum internum dan forum eksternum (Ropi, 2017). Forum internum adalah wilayah batin, keyakinan terdalam seseorang yang tidak boleh diganggu oleh negara atau kelompok mana pun. Di ruang ini, seseorang bebas mempercayai apa pun, bahkan tanpa harus menyatakannya. Sementara itu, forum eksternum adalah ruang tempat keyakinan itu diwujudkan

dalam ritual, identitas, dan bentuk-bentuk ekspresi lainnya. Di tingkat eksternal inilah sering muncul pembatasan, baik oleh aturan negara maupun tekanan sosial (Rahmat, 2021).

Kerangka Ropi sangat relevan untuk membaca fenomena di Mentawai. Seseorang dapat secara administratif menjadi pemeluk agama dunia, tetapi secara batin dan dalam praktik keseharian tetap hidup dalam Arat Sabulungan. Ruang batin tetap terjaga, tetapi ruang publik sering kali harus dinegosiasikan. Penjelasan ini membantu memahami mengapa beberapa ritual dilakukan secara sembunyi-sembunyi pada masa lalu, mengapa hingga hari ini banyak keluarga tetap menjalankan nilai-nilai Arat Sabulungan tanpa harus mengidentifikasi diri sebagai penganut agama leluhur.

Ketiga kerangka teori ini saling mengisi. Dari Honneth, didapatkan pemahaman tentang dimensi relasional rekognisi. Dari Maarif, melihat bagaimana kekuasaan negara membentuk batas-batas rekognisi itu. Dari Ropi, memahami ruang-ruang kebebasan dan pembatasan tempat identitas agama dijalani. Dengan menggabungkan ketiganya, dapat melihat perjalanan Arat Sabulungan bukan hanya sebagai kisah tentang agama leluhur yang ditekan dan ditepikan, tetapi sebagai kisah tentang masyarakat yang terus berupaya menegosiasikan martabat dan identitas spiritualnya di tengah perubahan politik dan sosial.

Kerangka ini menjadi fondasi bagi analisis dalam bab-bab selanjutnya. Memungkinkan untuk membaca dinamika

rekognisi bukan sekadar dari sudut pandang hukum atau sejarah, tetapi sebagai pengalaman manusia yang penuh nuansa, emosi, dan strategi bertahan. Dengan demikian, dapat dipahami bagaimana Arat Sabulungan tetap hidup, bukan hanya sebagai tradisi masa lalu, tetapi sebagai identitas yang terus dibentuk melalui hubungan, ingatan, solidaritas, dan perjuangan sehari-hari.

Metode Membaca Agama dari Tepi

Berangkat dari keinginan untuk memahami Arat Sabulungan bukan sekadar sebagai rangkaian ritual, melainkan sebagai sebuah pandangan hidup yang terus ada di tengah masyarakat Mentawai. Untuk itu, pendekatan kualitatif yang memungkinkan penulis menyelami keseharian masyarakat dan menangkap cerita-cerita yang tidak selalu muncul dalam percakapan formal. Pendekatan ini dipilih karena persoalan rekognisi tidak dapat sepenuhnya dipahami melalui angka atau data statistik. Melainkan harus dilihat dari kedekatan, dari percakapan yang pelan, atau dari jeda panjang ketika narasumber mengingat kembali pengalaman yang traumatis. Pendekatan kualitatif membantu mengungkap sisi humanistik di balik dinamika identitas spiritual yang rumit (Afrizal, 2014).

Kehidupan masyarakat desa Matotonan di Siberut Selatan menjadi ruang utama pembacaan dalam buku ini. Desa Matotonan bukan hanya dipilih karena posisinya sebagai ruang

di mana agama leluhur masih hidup, tetapi juga karena masyarakatnya menjalani kehidupan keagamaan yang berlapis, mengaku memeluk agama dunia, namun tetap menjaga hubungan dengan sikerei, menjalankan pantangan, dan merawat hutan sebagai bagian dari kewajiban spiritual. Desa ini menjadi semacam laboratorium hidup bagi penelitian tentang rekognisi, tempat di mana identitas ditampilkan sekaligus disembunyikan, dinegosiasikan sekaligus dirayakan. Kehadiran secara langsung di desa ini memungkinkan terjadinya perjumpaan langsung dengan pengalaman-pengalaman yang tidak tercatat dalam laporan pemerintah atau dokumen administratif.

Penggalian cerita dan pengalaman dilakukan melalui tiga cara utama: observasi partisipatif, wawancara, dan dokumentasi. Observasi partisipatif dilakukan dengan mengikuti aktivitas masyarakat sehari-hari, bertemu sikerei yang sedang mempersiapkan obat, mengobrol dengan orang tua yang menceritakan masa kecilnya ketika uma mereka harus dibakar, atau menyimak percakapan ringan di serambi rumah tentang perubahan-perubahan di desa. Melalui cara ini, dapat menangkap nuansa yang mungkin tidak keluar dalam wawancara formal, seperti ekspresi tubuh, nada suara, atau cara seseorang menghindari suatu topik tertentu. Cara ini menjadi kunci untuk memahami bagaimana rekognisi dijalankan dalam praktik. Di mana batas-batas identitas dipertahankan atau

dilonggarkan, dan bagaimana masyarakat beradaptasi dengan tekanan internal maupun eksternal.

Wawancara dilakukan secara semi terstruktur, memberikan ruang bagi narasumber untuk bercerita sesuai alur pikiran mereka. Beberapa wawancara dilakukan dengan sikerei, tokoh agama, tokoh adat yang menjadi penjaga pantangan keluarga, aparat desa, guru, dan pemuda yang sedang bergulat dengan identitas barunya. Percakapan-percakapan ini tidak hanya menghadirkan informasi, tetapi juga membuka ruang refleksi mengenai bagaimana masyarakat memahami Arat Sabulungan hari ini, baik sebagai warisan, sebagai beban, maupun sebagai sumber kebanggaan. Dalam banyak kesempatan, wawancara berubah menjadi sesi berbagi memori kolektif yang penuh rasa haru, terutama ketika membahas ingatan tentang penertiban dan pembakaran uma.

Data dokumentasi digunakan untuk memperkuat temuan lapangan, meliputi catatan pemerintah desa, arsip, catatan pribadi keluarga, serta foto-foto lama yang masih disimpan oleh beberapa warga. Dokumen-dokumen ini membantu membangun konteks historis yang lebih kokoh dan memberi gambaran tentang bagaimana Arat Sabulungan berpindah dari ruang publik ke ruang privat dan diusahakan untuk kembali ke ruang publik dalam beberapa dekade terakhir.

Proses analisis mengikuti model yang lazim digunakan dalam penelitian kualitatif (Miles et al., 2014). Data

ditranskripsikan, dikoding, kemudian dikelompokkan dalam tema-tema yang berkaitan dengan rekognisi, hubungan intim dalam keluarga, posisi agama resmi dalam kehidupan masyarakat, peran negara, ruang-ruang kebebasan dan tekanan, serta strategi masyarakat dalam mempertahankan identitas leluhurnya. Analisis dilakukan secara bertahap, sambil terus berdialog dengan kerangka teori yang telah dijabarkan pada bagian sebelumnya. Dengan cara ini, teori tidak berdiri sebagai konsep yang jauh, tetapi hadir sebagai alat untuk membaca kenyataan sosial yang dialami masyarakat.

Pendekatan metodologis ini memungkinkan untuk melihat Arat Sabulungan tidak hanya sebagai subjek kajian, tetapi sebagai bagian dari kehidupan yang penuh dinamika, perasaan, dan pergulatan. Dengan menggabungkan observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta menempatkan diri dalam keseharian masyarakat, buku ini berupaya menghadirkan gambaran yang tidak hanya akurat secara akademik, tetapi juga jujur terhadap pengalaman nyata yang dijalani masyarakat Mentawai. Dengan demikian, cara yang digunakan tidak hanya membangun validitas ilmiah, tetapi juga memberi ruang bagi suara-suara yang selama ini berada di pinggir untuk muncul dan didengar.

ARAT SABULUNGAN DAN AGAMA DUNIA

Arat Sabulungan

Memulai pembahasan tentang Arat Sabulungan, agama leluhur masyarakat Mentawai, membawa pada satu pertanyaan mendasar, apa itu agama? Pertanyaan sederhana ini sering kali terlihat mudah dijawab, tetapi justru di sinilah letak kerumitannya. Dalam ruang akademik, definisi agama telah diperdebatkan selama lebih dari satu abad. Setiap sarjana mencoba menawarkan definisinya sendiri, kadang filosofis, kadang antropologis, kadang sosiologis, namun tidak ada satu pun yang sungguh-sungguh diterima oleh semua.

Bagi sarjana yang bergelut dalam studi agama, hal ini bukanlah hal baru. Tumpukan literatur yang membahas definisi agama justru menunjukkan betapa kompleksnya fenomena yang coba ditangkap. Agama tidak pernah sepenuhnya bisa didefinisikan. Definisi selalu membuka ruang bagi pertanyaan baru. Bahkan dalam ranah kebijakan, masalahnya lebih rumit (Wahyuni, 2024). Definisi agama bukan semata-mata soal

ketepatan akademik, tetapi juga soal batas tentang apa yang diakui, apa yang dikecualikan, dan siapa yang akhirnya diuntungkan atau dirugikan oleh batasan tersebut.

Berbagai sarjana klasik telah mencoba merumuskan agama dari beragam sudut pandang. Tylor (1871), James (1902), hingga Otto (1958) melihat agama sebagai kepercayaan pada roh atau Yang Ilahi. Eliade (1968) memisahkan yang sakral dari yang profan. Durkheim (1965) memandang agama sebagai cermin tatanan sosial, Marx dan Engels (1964) melihatnya sebagai refleksi ketidaksetaraan ekonomi, sementara Freud (1961) menganggap agama sebagai proyeksi psikologis (Maarif, 2012). Semua upaya ini membuka jalan penting dalam memahami agama, tetapi sekaligus memperlihatkan betapa luas kajian agama itu sendiri.

Karena itulah, buku ini memilih berjalan di jalur lain, jalur yang lebih mendekati pengalaman hidup masyarakat. Mengikuti pemikiran Evans-Pritchard (1965), Hallowell (1960/1975), Bird-David (1999), Morrison (2000), hingga Maarif (2012) agama di sini dipahami bukan sebagai seperangkat doktrin atau kepercayaan abstrak, melainkan sebagai cara manusia membangun dengan sesama manusia, dengan leluhur yang telah tiada, dengan hewan dan tumbuhan, dengan hutan dan sungai, serta dengan entitas tidak terlihat yang hidup berdampingan dengan mereka.

Dari sudut pandang ini, agama bukan sekadar ritual atau ajaran, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari. Agama hadir dalam cara orang bekerja, menanam, berburu, menyembuhkan, mengambil keputusan, dan berinteraksi dengan lingkungan. Cara berhubungan inilah yang menjembatani batas antara manusia dan selain dia, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Pendekatan ini memberi ruang untuk melihat agama sebagai pengalaman yang hidup, bukan sebagai definisi administratif yang kaku.

Menggunakan definisi yang lebih inklusif ini membuka pintu bagi pembahasan yang lebih adil terhadap agama leluhur atau agama lokal atau indigenous religions yang selama ini sering dipinggirkan dalam studi agama. Dengan kerangka ini, Arat Sabulungan bukan lagi sekadar adat atau aliran kepercayaan, melainkan sebuah agama dalam arti yang paling mendasar. Arat Sabulungan sebuah cara masyarakat Mentawai memahami dunia dan membangun hubungan dalam kehidupan sehari-hari dengan seluruh entitas, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Dari titik pemahaman ini, pembahasan mengenai Arat Sabulungan dalam bab-bab berikutnya dimulai. Sebuah perjalanan memasuki dunia yang dilihat dan tidak dilihat. Dunia di mana manusia, alam, dan supranatural saling terhubung dalam satu jalinan kehidupan.

Arat Sabulungan telah hidup jauh sebelum negara hadir dan sebelum agama-agama dunia masuk ke kepulauan

Mentawai (Wahyuni et al., 2023). Dalam berbagai kajian awal tentang kebudayaan Mentawai, makna Sabulungan sering ditafsirkan melalui kata *bulug* yang berarti daun. Para peneliti seperti Sihombing (2008) serta Rudito (1993, 1999) memaknai Sabulungan sebagai kepercayaan yang bertumpu pada kekuatan daun-daun tertentu, daun yang digunakan sikerei untuk menari, mengobati, dan memediasi hubungan antara manusia dan non-manusia. Dalam pandangan ini, daun bukan sekadar tanaman, melainkan medium sakral yang menjembatani dunia yang terlihat dan yang tidak terlihat. Karena itu, Sabulungan dipahami sebagai sistem kepercayaan yang mengandalkan daya magis alam, khususnya daun untuk menghadirkan kesembuhan dan perlindungan.

Namun, kajian yang lebih baru memberikan pemahaman yang berbeda. Tulus (2013) melalui penelitian mendalamnya bersama masyarakat Mentawai, menawarkan interpretasi yang lebih berakar pada bahasa dan pengalaman spiritual masyarakat Mentawai sendiri. Menurutnya, kata Sabulungan berasal dari *sa* yang bermakna jamak, dan *bulungan* berakar dari kata *bulu*, yang bermakna mempersembahkan. *Bulungan* merujuk kepada sekelompok roh yang tidak dikenal, roh-roh yang hidup berdampingan dengan manusia, tetapi menuntut penghormatan khusus melalui ritual. Dalam pengertian ini, Sabulungan bukan sekadar tentang daun atau alam, melainkan tentang hubungan manusia dengan roh-roh yang membentuk keseimbangan dunia.

Temuan lapangan penulis di desa Matotonan mendekat pada interpretasi Tulus. Ketika ditanya mengenai Sabulungan, sikerei yang bertugas sebagai penyembuh, penari ritual, dan penjaga keseimbangan sering kali memberi jawaban pendek dan berhati-hati. Mereka mengaitkan sabulungan dengan makhluk halus yang mengerikan, entitas yang tidak boleh disebut sembarangan. Dalam percakapan yang lebih dalam, tampak adanya ketidaknyamanan atau keengganan untuk membicarakan sabulungan secara terbuka. Sebagian dari mereka seolah menyembunyikan sesuatu, menyiratkan bahwa penyebutan roh-roh tertentu tanpa konteks ritual dianggap berbahaya atau tidak pantas.

Dalam budaya Mentawai, menyebut nama roh dengan sembarangan bisa dianggap sebagai undangan yang tidak sopan. Selain itu, sejarah panjang pelarangan dan stigmatisasi Arat Sabulungan membuat masyarakat terbiasa untuk membicarakannya secara tertutup. Namun, di balik kehati-hatian itu, terlihat jelas bahwa sabulungan adalah inti dari kosmologi masyarakat Mentawai, sebuah dunia roh yang tidak selalu ramah, tetapi harus dihormati agar keseimbangan terjaga.

Dengan demikian, Arat Sabulungan tidak dapat dipahami hanya sebagai ritual atau sebagai simbol budaya. Arat Sabulungan adalah jaringan hubungan antara manusia, supranatural, dan alam (Wahyuni et al., 2025). Dalam setiap tarian sikerei, dalam pantangan keikei, dalam pemilihan daun

untuk pengobatan, serta dalam doa-doa yang dibisikkan kepada roh, Arat Sabulungan hadir sebagai pandu yang menjaga kehidupan tetap berjalan dalam keseimbangan (Wahyuni & Sabna, 2025).

Bagi masyarakat Mentawai, dunia tidak hanya terdiri dari apa yang dapat disentuh, dilihat, atau dirasakan oleh pancaindra. Hidup mereka berlangsung di antara dua alam yang saling terhubung, dunia kasat mata dan dunia tidak kasat mata. Keduanya tidak berdiri sebagai dua kutub yang terpisah, melainkan bertemu dalam ruang kehidupan sehari-hari, saling memengaruhi, dan membentuk keseimbangan yang harus dijaga.

Dunia kasat mata adalah segala hal yang dapat dipahami manusia melalui pengalaman fisik, seperti manusia, hewan, pepohonan, sungai, laut, bebatuan, dan bintang alam lainnya. Namun di balik dunia yang terlihat, terdapat lapisan lain yang lebih halus, yakni dunia spiritual, tempat beredarnya berbagai roh yang memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat.

Orang Mentawai percaya bahwa roh-roh ini menghuni berbagai penjuru. Sebagian hidup di langit, sebagian di kedalaman bumi. Ada yang bersemayam di lautan, menyusuri sungai, atau berada di hutan lebat. Entitas-entitas ini bukan sekadar mitos, melainkan bagian dari tatanan kosmos yang diakui dan dihormati. Mereka memiliki pemimpin dan

wilayahnya masing-masing, seperti *Taikamanua* (penguasa dunia langit), *Taikababagatkoat* (penguasa laut), *Taikaleleu* (penjaga wilayah darat dan hutan), dan *Taikapolok* (penguasa dunia bawah bumi). Setiap wilayah memiliki penunggunya, setiap penunggu memiliki kehendaknya.

Dalam pandangan ini, tidak ada batas keras antara yang nyata dan yang gaib. Pohon yang terlihat dan dapat disentuh mungkin hanya salah satu manifestasi dari pohon itu. Di dalamnya atau di baliknya, bisa hidup pohon lain yang tidak kasat mata yang hanya dapat dilihat oleh mereka yang memiliki kemampuan khusus. Penglihatan manusia biasa tidak dapat menembus dunia itu, hanya sikerei yang mampu melintasi batas tersebut.

Sikerei memegang peran sentral dalam Arat Sabulungan. Mereka adalah penyembuh, penari, mediator, dan penghubung antara manusia dan roh. Melalui ritual, tarian, dan penglihatan transendental, para sikerei dapat melihat dunia roh, berbicara dengan entitas gaib, serta menegosiasikan keseimbangan agar manusia tidak tersesat atau terluka. Dalam setiap upacara pengobatan, sikerei tidak sekadar mencari penyebab fisik dari penyakit, tetapi juga membaca tanda-tanda gangguan spiritual yang mungkin datang dari roh yang tersinggung, lupa diberi persembahan, atau sekadar ingin menarik perhatian.

Hubungan antara manusia dan alam dalam Arat Sabulungan didasarkan pada konsep spiritual yang kompleks.

Setiap makhluk hidup memiliki *simagere*, yakni daya hidup yang menggerakkan tubuh dan memungkinkan pertumbuhan. *Simagere* bukan sekadar jiwa, tetapi energi vital yang menyatukan manusia dengan dunia lainnya. Selain itu, terdapat *ketsat*, yakni roh yang mendiami tubuh makhluk hidup. Ketika seseorang meninggal, *simagere* dan *ketsat* tidak lenyap. Mereka kembali ke dunia spiritual dan dikenal sebagai *ukkui* atau *kalimeu*, roh-roh leluhur yang tetap hadir, mengamati, dan kadang terlibat dalam kehidupan keturunannya.

Di atas semua entitas roh itu, sebagian masyarakat Mentawai meyakini adanya satu kekuatan supranatural yang lebih besar, disebut *ulaumanua* yang dipercaya cahaya kuat yang melampaui batas dunia. *Ulaumanua* tidak berwujud tokoh dengan kepribadian tertentu, tetapi dipahami sebagai energi yang menopang kehidupan. Kehendaknya menjadi penentu nasib, kapan manusia dilahirkan, kapan mereka kembali ke dunia roh, kapan semua entitas hidup dan mati. Dalam keseharian, *ulaumanua* bukan figur yang disembah secara personal, namun diyakini sebagai penjaga besar atas keseimbangan seluruh alam semesta.

Kepercayaan akan kehadiran roh, *simagere*, *ketsat*, dan *ulaumanua* membentuk cara orang Mentawai memandang alam. Alam bukan sekadar latar kehidupan, melainkan ruang spiritual yang penuh makna. Sungai, hutan, tanah, dan pepohonan memiliki kehidupan dan kehendak sendiri. Karena itu,

masyarakat Mentawai menempatkan diri bukan sebagai penguasa, tetapi sebagai bagian dari alam yang harus dijaga. Mereka mengelola ladang, berburu, menebang pohon, dan memanfaatkan sumber daya dengan penuh pertimbangan. Setiap tindakan memiliki konsekuensi spiritual, sehingga harus dilakukan dengan hati-hati dan disertai izin dengan ritual Arat Sabulungan.

Pengelolaan alam dilakukan tidak hanya melalui aturan praktis, tetapi juga melalui pantangan dan ritual. Menebang pohon, misalnya, tidak boleh dilakukan sembarangan. Sebelum menebang, harus ada izin dengan sikerei. Tanpa izin ini, penebangan dianggap sebagai pelanggaran terhadap keseimbangan alam dan membawa risiko sakit, kecelakaan, atau gangguan roh. Begitu pula dalam berburu, makanan tertentu seperti belut tidak boleh dimakan sebelum perburuan, karena diyakini dapat menarik bahaya.

Pantangan-pantangan semacam ini bukan sekadar aturan, melainkan bentuk hormat terhadap roh-roh yang menghuni alam. Bahkan dalam perladangan, masyarakat tidak merusak hutan untuk selamanya. Ketika meninggalkan ladang, mereka menanam kembali pohon langsung, durian, atau rambutan sebagai tanda balas budi kepada tanah yang telah memberi makan. Dengan cara inilah mereka menjaga kesinambungan ekologis sambil memelihara hubungan spiritual dengan alam.

Namun tantangan terbesar datang dari luar, penebangan ilegal, eksploitasi kayu berskala besar, dan tekanan ekonomi dari pihak luar mengancam keseimbangan yang selama ini dijaga. Banyak warga Mentawai menyadari bahwa ancaman terhadap alam lebih sering datang dari orang luar, bukan dari mereka yang hidup dengan Arat Sabulungan. Tokoh adat dan warga desa mengungkapkan kekhawatiran mereka melihat hutan ditebang tanpa kendali, bertentangan dengan nilai-nilai yang mereka pegang sejak berabad-abad.

Meski perubahan zaman membawa agama-agama dunia dan modernisasi masuk ke pedalaman. Penghormatan masyarakat Mentawai terhadap alam, warisan dari Arat Sabulungan, tidak sepenuhnya hilang. Terutama di pulau Siberut, jejak Arat Sabulungan masih kuat dalam kenyataan hidup sehari-hari. Dari cara mereka memanfaatkan pohon hingga cara mereka memelihara hubungan dengan roh.

Arat Sabulungan bukan sekadar sistem kepercayaan, melainkan cara hidup. Arat Sabulungan mengajarkan bahwa dunia terlihat dan tidak terlihat saling membutuhkan. Bahwa manusia hidup bukan untuk menguasai alam, tetapi untuk merawatnya. Bahwa roh leluhur selalu hadir. Bahwa keseimbangan antara dunia adalah syarat bagi keberlangsungan hidup. Selama nilai-nilai ini terus dijalankan di ladang, di hutan, di sungai, atau di ruang keluarga, Arat Sabulungan tetap hidup. Tidak hanya sebagai warisan spiritual, tetapi juga sebagai cara

hidup yang menjaga Mentawai tetap lestari dari generasi ke generasi.

Islam di Mentawai

Masuknya Islam ke Mentawai adalah sebuah kisah yang tidak memiliki tanggal pasti. Islam tidak datang dalam satu rombongan besar atau satu peristiwa monumental, melainkan hadir perlahan-lahan melalui jejak para pedagang yang singgah di pesisir kepulauan Mentawai. Para pedagang dari pesisir pulau Sumatera datang untuk membeli rotan dan lontar, menukarnya dengan kebutuhan sehari-hari. Dalam pertukaran sederhana itulah Islam mulai diperkenalkan (Nelmaya & Deswalantri, 2021). Para mualim Minangkabau kemudian menjadi tokoh penting dalam penyebaran Islam, dan catatan etnografis menunjukkan bahwa pada abad ke-18 agama ini telah mulai dikenal oleh masyarakat Mentawai (Delfi, 2012).

Pada masa pendudukan Jepang, ketika mengajar agama dilarang, para mualim tetap memilih datang ke kampung-kampung, berbicara pelan kepada beberapa keluarga, dan menanamkan ajaran yang menurut mereka dapat membawa perubahan. Meskipun jumlah orang Mentawai yang masuk Islam pada masa itu masih sangat sedikit, langkah-langkah kecil itulah yang kelak menjadi fondasi awal penyebaran Islam yang lebih luas (Delfi, 2013).

Catatan yang lebih sistematis mengenai dakwah Islam muncul pada tahun 1975, ketika para da'i bekerja secara lebih terorganisasi di wilayah Siberut. Kantor Wilayah Departemen Agama Sumatera Barat, bekerja sama dengan Dewan Dakwah Indonesia, mengumpulkan laporan para da'i yang melayani komunitas yang dikategorikan sebagai suku terasing (Delfi, 2012). Dukungan finansial datang dari lembaga-lembaga keagamaan internasional, termasuk dari Arab Saudi dan Kuwait, sehingga para da'i dapat tinggal lebih lama di desa-desa Mentawai, terutama di Siberut Selatan.

Bagi sebagian masyarakat Mentawai, dakwah para da'i terasa mudah dipahami. Ajaran Islam mampu menyentuh keseharian masyarakat Mentawai. Penyebaran agama tidak terjadi semata melalui ceramah atau ajakan, tetapi juga melalui perkawinan dan bantuan-bantuan kesejahteraan. Ada keluarga-keluarga yang mulai merasakan kedekatan dengan Islam karena relasi sosial yang berkembang, bukan semata karena argumen teologis (Wirman et al., 2021).

Mereka yang menerima Islam kemudian dikirim untuk belajar agama ke Tanah Tepi seperti Padang Panjang, Pariaman, Bukittinggi, dan Padang. Setelah menamatkan pendidikan, mereka kembali ke desa-desa Mentawai untuk mengajarkan ilmu agama yang baru mereka peroleh. Dengan demikian, penyebaran Islam berjalan melalui jalur yang berlapis, dakwah para da'i dari luar, pendidikan anak-anak muda Mentawai di

Sumatera Barat, dan kembalinya mereka sebagai pengajar agama di kampung sendiri (Delfi, 2012).

Menariknya, para da'i yang bekerja di Siberut memahami dengan baik posisi strategis sikerei sebagai penjaga keseimbangan sosial-budaya Mentawai. Alih-alih menantang kewibawaan mereka secara langsung, beberapa da'i bersikap lembut bahkan mengakomodasi keberadaan sikerei. Ada sikerei yang masuk Islam, namun tetap menjalankan ritual Arat Sabulungan. Para da'i tidak menuntut mereka untuk memilih salah satu secara absolut. Mereka tahu bahwa pemaksaan hanya akan kontraproduktif. Yang penting bagi para da'i adalah generasi muda. Melalui pendidikan, mereka berharap identitas Muslim akan tumbuh lebih kuat dari waktu ke waktu (Wirman et al., 2021).

Namun perubahan keyakinan tidak serta-merta menghapus praktik lama. Banyak orang Mentawai yang telah masuk Islam masih menunjukkan kepercayaan pada roh-roh, terutama dalam hal pengobatan. Ketika sakit, mereka datang ke puskesmas untuk mendapatkan obat dari bidan, tetapi tetap mengundang sikerei untuk melakukan ritual penyembuhan. Dalam ritual itu, makanan ritual yang berbahan dasar daging babi tetap digunakan. Suatu hal yang jelas bertentangan dengan syariat Islam, tetapi tetap dianggap penting bagi kesembuhan (Wirman et al., 2021).

Babi bagi masyarakat Mentawai, bukan sekadar makanan. Babi adalah bagian dari kebudayaan masyarakat Mentawai. Babi mudah ditemukan, mudah dipelihara, dan terjalin dalam saran-saran penyembuhan dari sikerei. Karena itu, meskipun banyak orang Mentawai memahami bahwa babi adalah haram, maknanya tidak sama dengan pemaknaan umat Islam pada umumnya. Orang Islam Mentawai kadang berkata, “babi memang haram, tetapi juga *mananam* (lezat)” sebuah ungkapan yang merangkum pergulatan identitas yang kompleks (Delfi, 2013).

Tidak sedikit orang Mentawai yang telah memeluk Islam tetap secara terbuka mengakui bahwa mereka makan babi. Dalam pesta besar, babi disembelih dan dimasak bersama-sama. Dalam ritual penyembuhan, babi menjadi persembahan. Dalam kehidupan sehari-hari, babi dipelihara, dijual, dan dipertukarkan untuk keperluan sosial.

Di sinilah terlihat bahwa identitas keagamaan bukanlah sesuatu yang statis. Namun dibentuk oleh percakapan, oleh ruang, oleh waktu. Bahkan ketika data kependudukan mencatat bahwa seseorang adalah Muslim, praktik Arat Sabulungan tetap hidup dalam ritual kelahiran, penyembuhan, kematian, pendirian *uma*, hingga pantangan *keikei* yang terus dijalankan. Intensitasnya berbeda-beda di tiap kampung, tetapi di sepanjang Sungai Rereiket praktik itu masih menemukan denyutnya (Delfi, 2012).

Islam datang dengan lembut, tetapi transformasi identitas berjalan secara pelan, bertahap, dan sering kali tidak linear. Di Mentawai, seseorang dapat menjadi Muslim secara administratif, Arat Sabulungan secara kultural, dan sekaligus keduanya secara spiritual. Identitas tidak pernah tunggal, identitas berlapis, dinegosiasikan setiap hari dalam tubuh, dalam makanan, dalam doa, dan dalam hutan yang tetap menjadi penanda kehidupan orang Mentawai.

Kristen di Mentawai

Kehadiran Kristen Protestan membawa cerita yang berbeda. Pada awal abad ke-20, zending Jerman dan misi kolonial Belanda menjadikan Mentawai sebagai wilayah pelayanan dan penyebaran ajaran Kristen. Di beberapa tempat, para utusan zending berusaha memperkenalkan tata ibadah dan sekolah yang sering kali bersamaan dengan aturan-aturan moral yang bertujuan mentransformasi masyarakat Mentawai. Namun proses ini tidak selalu berjalan linear. Banyak keluarga yang menerima baptisan tetap meminta pertolongan sikerei ketika sakit atau menghadapi peristiwa penting kehidupan. Mereka menempatkan suasana gereja dan suasana *uma* dalam ruang sosial yang berbeda, bukan sebagai pilihan yang saling meniadakan, tetapi sebagai dua sumber makna yang bisa berjalan beriringan.

Catatan sejarah menunjukkan bahwa awal mula kedatangan Kristen di Mentawai bermula pada tahun 1901. Pada masa itu, kepulauan Mentawai menjadi titik singgah yang cukup ramai bagi para pedagang dan pelaut yang melintas di sekitar Sikakap dan Sipora. Arus manusia yang datang dan pergi membawa cerita, barang-barang dagangan, dan juga keyakinan baru. Di antara arus inilah para misionaris Jerman yang diutus pemerintah kolonial Belanda hadir, membawa misi zending dan membuka babak baru dalam sejarah keagamaan Mentawai (Tulius, 2013).

Dua pendeta, August Lett dan A. Kramer, menjadi tokoh yang dikenal luas sebagai pelopor zending Kristen di Mentawai. Mereka memilih Pulau Pagai Utara, khususnya Sikakap sebagai pusat kegiatan mereka. Namun tugas mereka jauh dari sekadar membacakan ayat-ayat atau menggelar ibadah. Pada masa itu, strategi zending dijalankan melalui pendekatan yang bersifat sosial. Gereja menyediakan layanan kesehatan sederhana, membangun sekolah bagi anak-anak, dan mengajarkan keahlian pertukangan ringan kepada masyarakat. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa misi zending bukan hanya proyek keagamaan, tetapi juga upaya menciptakan kepercayaan melalui kerja-kerja pelayanan (Glossanto, 2019; Zalman, 2018).

Meskipun begitu, langkah awal misi Kristen tidak berjalan semudah yang diharapkan. Arat Sabulungan masih sangat kuat mencengkeram kehidupan masyarakat Mentawai. Arat

Sabulungan bukan sekadar kepercayaan tapi adalah cara hidup, cara membaca hutan, cara memahami sakit, dan cara menjalin relasi dengan leluhur. Menghadapi struktur spiritual yang telah mengakar selama berabad-abad, ajaran baru yang dibawa zending seperti suara asing yang belum dikenal ritmenya.

Namun hambatan terbesar bukan berasal dari ajaran, melainkan dari politik kolonial. Akibatnya, setiap pendatang berkulit putih, termasuk para misionaris dianggap bagian dari kolonial. Dalam situasi yang penuh ketegangan ini, pendeta August Lett menjadi korban perlawanan masyarakat yang menolak kehadiran kolonialisme di tanah Mentawai.

Perjalanan zending tidak berhenti di situ. Setelah masa kekacauan mereda, tugas pelayanan diteruskan oleh pendeta F. Borger, seorang misionaris yang berhasil bertahan hingga dua puluh tahun lebih. Berbeda dengan pendahulunya, Borger memiliki kemampuan membangun hubungan sosial yang lebih stabil, tinggal lebih lama, mengenal bahasa setempat, dan perlahan-lahan mendapatkan kepercayaan orang Mentawai. Pendekatan yang persuasif dan penuh kesabaran membuat beberapa keluarga mulai terbuka terhadap ajaran Kristen.

Pada 9 Juli 1916, sejarah mencatat peristiwa penting. Sebelas orang Mentawai secara resmi menyatakan diri memeluk Kristen di bawah pendampingan Pendeta Borger. Peristiwa ini kemudian menjadi simbol kelahiran Gereja Kristen Protestan Mentawai, dengan Nanemlehu di Pulau Pagai Utara sebagai

lokasi berdirinya gereja pertama (Markus, 2016). Meski jumlahnya kecil, keputusan sebelas orang itu membuka pintu bagi perubahan yang lebih besar di tahun-tahun berikutnya.

Setelah Perang Dunia II berakhir, aktivitas zending mengalami percepatan yang jauh lebih masif. Kehadiran para misionaris menjadi lebih terstruktur dan upaya penyebaran ajaran semakin meluas terutama di wilayah selatan kepulauan Mentawai. Pada periode ini, salah satu pencapaian besar adalah penerjemahan Kitab Suci ke dalam bahasa Mentawai dengan dialek Sikakap. Penerjemahan ini bukan hanya upaya linguistik. Namun bentuk penghormatan terhadap bahasa Mentawai sebagai identitas masyarakat. Dengan firman Tuhan dihadirkan melalui bahasa yang mereka gunakan sehari-hari, pengajaran gereja menjadi lebih dekat dan lebih mudah dipahami. Bahasa Mentawai dialek Sikakap kemudian diinstitusikan sebagai bahasa liturgi, dan hingga hari ini tetap menjadi bahasa ibadah di berbagai gereja di Mentawai.

Perjumpaan antara Kristen dan masyarakat Mentawai tidak serta-merta menggantikan Arat Sabulungan. Namun menghadirkan ruang baru di mana dua sistem nilai saling bertemu, kadang bertabrakan, kadang berdampingan. Proses ini berlangsung perlahan, penuh negosiasi, dan tidak selalu linear. Tetapi jejaknya jelas. Gereja, sekolah, bahasa, dan pengetahuan baru membentuk lanskap sosial Mentawai modern, sementara

Arat Sabulungan tetap bertahan sebagai napas dari kehidupan sehari-hari.

Katolik di Mentawai

Masuknya Katolik ke Mentawai dapat dikatakan lebih muda dibandingkan dengan jejak kedatangan Islam dan Kristen di kepulauan Mentawai. Namun meski datang belakangan, jejaknya meninggalkan perubahan yang signifikan dalam lanskap spiritual Mentawai. Kisah itu dimulai pada tahun 1953, ketika Pastor Aurelio Canizzaro memutuskan untuk menyusuri Mentawai, khususnya wilayah Siberut Selatan dalam rangka menilai potensi penyebaran ajaran Katolik. Kunjungannya bukan semata inisiatif pribadi, ia datang membawa tugas resmi dari Monsinyur De Martino, Uskup Padang yang ingin memahami kondisi masyarakat Mentawai secara langsung sebelum membuka misi baru di Mentawai.

Pastor Canizzaro mengarungi pulau-pulau dengan perahu-perahu kecil, singgah dari satu kampung ke kampung lain. Ia berbicara dengan para tetua, mencatat kebutuhan masyarakat, dan merasakan sendiri pola hidup sehari-hari penduduk Mentawai yang saat itu masih sangat erat dengan Arat Sabulungan. Kunjungan itu memberi gambaran yang jelas bahwa jika gereja Katolik ingin hadir, gereja harus masuk dengan cara yang halus, sabar, dan memahami konteks budaya yang telah mengakar kuat.

Hasil evaluasi itu menjadi dasar bagi langkah berikutnya. Pada 18 Desember 1954, Pastor Canizzaro kembali ke Siberut, kali ini bersama rekannya Pastor Angelo Calvi. Tidak lagi sekadar sebagai pengamat, keduanya datang dengan tekad untuk menetap dan membuka misi Katolik di Mentawai. Perjalanan mereka mencapai puncaknya pada perayaan Natal tahun 1954, ketika gereja Katolik pertama resmi didirikan. Gereja tersebut menjadi simbol dimulainya sebuah awal perjalanan kehadiran Katolik di tanah Mentawai.

Sejak hari pertama, Gereja Katolik tidak hanya membawa ritus dan ajaran, gereja juga membawa pelayanan. Para pastor dan misionaris berusaha menjawab kebutuhan masyarakat melalui pendidikan dan kesehatan, dua sektor yang ketika itu masih sangat terbatas. Sekolah-sekolah sederhana mulai dibangun, pengobatan dasar mulai diberikan, dan gereja menjadi ruang belajar sekaligus ruang perlindungan. Pelayanan sosial ini menjadi jembatan pertama yang menghubungkan kedua dunia yang berbeda, dunia Katolik dan dunia adat Mentawai.

Namun yang membuat misi Katolik di Mentawai berkembang secara unik adalah semangat inkulturasi gereja. Inkulturasi bukan sekadar metode, tetapi sikap dasar gereja Katolik untuk menghayati Injil melalui cara-cara yang dapat dirasakan sebagai bagian dari budaya lokal. Gereja memahami bahwa pesan agama tidak dapat bertahan jika memaksa

masyarakat meninggalkan seluruh warisan leluhur mereka (Rukiyanto, 2019; Satoko & X, 2023; Siritoitet & Zalukhu, 2025). Karena itulah, nilai-nilai Injil mulai diterjemahkan melalui simbol-simbol yang akrab bagi masyarakat Mentawai, melalui bahasa, musik, pola hidup, hingga ruang-ruang sosial yang terbentuk dalam sebuah *uma*.

Pemahaman seperti ini selaras dengan pandangan gereja dunia. Dalam surat ensiklik Paus Yohanes Paulus II tahun 1985 tentang *The Gospel and Culture*, disebutkan bahwa injil yang hidup adalah injil yang sanggup berakar pada budaya masyarakat, sekaligus memberi ruang bagi budaya tersebut untuk berkembang dalam kehidupan gereja (II, 1985). Gereja tidak datang sebagai kekuatan yang menggusur, melainkan sebagai ruang baru yang dapat berdialog dengan tradisi setempat. Prinsip inilah yang dihidupi para pastor di Mentawai.

Pendekatan inkulturatif gereja Katolik menciptakan suasana yang sangat berbeda dibandingkan periode sebelumnya ketika Arat Sabulungan ditekan oleh negara. Jika negara memaksa masyarakat melepaskan simbol-simbol kulturalnya, gereja Katolik justru berupaya merawatnya dengan menghargai tarian, menghormati peran tetua, memahami struktur *uma*, dan melihat relasi masyarakat dengan hutan bukan sebagai hambatan, melainkan sebagai bagian dari spiritualitas yang penting.

Kehadiran semacam ini memberi masyarakat Mentawai, khususnya di Siberut ruang emosional yang aman. Mereka tidak dipaksa melepaskan Arat Sabulungan. Tidak sedikit yang merasa bahwa Katolik memberikan tempat bagi identitas mereka untuk tetap hidup, meski dalam bentuk yang berbeda. Mereka bisa menyanyi dalam bahasa Mentawai, berdoa dengan simbol-simbol yang tidak sepenuhnya asing, dan melihat Gereja sebagai rumah baru yang tidak menghapus akar leluhur mereka.

Karena itu, banyak orang Siberut menerima Katolik bukan karena tekanan, tetapi karena kedekatan. Gereja tampil bukan sebagai kekuatan yang datang menundukkan, melainkan sebagai sahabat yang ingin memahami. Pendekatan ini membuat Katolik tumbuh lebih mudah di hati masyarakat Mentawai yang sedang mencari cara untuk menjaga tradisi mereka di tengah perubahan yang begitu cepat.

Pada akhirnya, kehadiran Katolik di Mentawai tidak hanya meninggalkan jejak keagamaan, tetapi juga jejak sosial dan kultural, jejak yang menunjukkan bahwa sebuah agama dapat hidup berdampingan dengan agama leluhur ketika memilih untuk mendengar, memahami, dan berjalan bersama masyarakat yang disapanya.

Perjumpaan Arat Sabulungan dan Agama Dunia

Pertemuan antara Arat Sabulungan dan agama-agama dunia bukan sekadar perjumpaan doktrin, melainkan

perjumpaan yang menyentuh lapisan terdalam kehidupan masyarakat Mentawai, cara mereka makan, berladang, berobat, berhubungan dengan hutan, hingga cara mereka memahami diri dan roh-roh di sekeliling mereka. Arat Sabulungan sebagai agama leluhur telah membentuk kosmologi Mentawai jauh sebelum Islam, Kristen, dan Katolik mulai menyapa pesisir-pesisir pulau pada abad-abad sebelumnya. Namun intensitas perjumpaan itu berubah drastis sejak pertengahan abad ke-20, ketika agama-agama dunia mulai masuk tidak hanya sebagai keyakinan yang dibawa perorangan, tetapi sebagai bagian dari proyek peradaban yang dibingkai negara.

Meskipun agama-agama dunia hadir dengan ragam pendekatan, titik balik terbesar dalam relasi mereka dengan Arat Sabulungan terjadi pada tahun 1954 ketika negara memprakarsai apa yang dikenal sebagai Rapat Tiga Agama. Negara dalam semangat modernisasi, menilai bahwa Arat Sabulungan tidak memenuhi kriteria agama sebagaimana didefinisikan oleh pemerintah. Karena itu, masyarakat Mentawai diminta memilih satu dari dua agama resmi saat itu, Islam atau Kristen. Ultimatum ini, sebagaimana telah banyak dicatat oleh para peneliti, menjadi upaya sistematis untuk meminggirkan agama leluhur dan memaksakan identitas agama baru kepada masyarakat Mentawai.

Ketika Islam, Kristen, dan Katolik berkembang sebagai agama resmi, Arat Sabulungan justru mengalami tekanan paling

besar. Ritual-ritual harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi, uma dirubuhkan, barang-barang spiritual dibakar, dan sikerei dipaksa menanggalkan perannya sebagai mediator antara manusia dan roh. Pengalaman-pengalaman semacam ini membuat perjumpaan dengan agama dunia tidak hanya sebuah proses keagamaan, tetapi juga peristiwa emosional yang meninggalkan luka kolektif.

Namun di tengah tekanan itu, sesuatu yang menarik terjadi. Alih-alih digantikan, Arat Sabulungan justru bertransformasi. Arat Sabulungan tidak hilang, melainkan bergerak ke ruang-ruang yang lebih kecil, dapur rumah, ladang keluarga, percakapan malam, atau dalam tubuh seorang sikerei yang terus mengingat doa-doa. Dalam ruang-ruang itulah identitas ganda masyarakat Mentawai terbentuk. Identitas administratif dan identitas spiritual yang tidak pernah benar-benar bertemu, tetapi juga tidak pernah saling meniadakan.

Pada akhirnya, perjumpaan antara Arat Sabulungan dan agama dunia adalah cerita tentang negosiasi. Masyarakat Mentawai tidak hanya menerima atau menolak. Mereka memilih, memilah, dan menyusun kembali identitas mereka sesuai kebutuhan, tekanan, dan harapan. Dalam proses itu, Arat Sabulungan tetap hidup. Bukan sebagai sisa masa lalu, tetapi sebagai sumber nilai yang terus bekerja di balik berbagai bentuk kehidupan keagamaan masyarakat Mentawai hari ini.

Bertemu Tanpa Menguasai

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Mentawai, agama dunia dan Arat Sabulungan tidak hadir sebagai dua kekuatan yang saling berebut ruang. Sebaliknya, keduanya berjalan berdampingan dalam ritme yang tenang. Masyarakat Mentawai memahami bahwa perjumpaan tidak selalu harus melahirkan konflik atau saling menguasai. Di banyak kampung yang tampak adalah hubungan yang saling menyesuaikan antara dua ajaran yang bertemu tanpa saling menaklukkan. Dua cara hidup yang berbagi tempat dalam satu tubuh dan satu komunitas.

Kehidupan berdampingan ini terlihat jelas dalam praktik penyembuhan. Ketika seseorang sakit, keluarga akan membawa pasien ke puskesmas untuk mendapatkan obat dan perawatan medis. Namun setelah itu, mereka biasanya memanggil sikerei untuk melakukan ritual penyembuhan. Obat modern dan ritual tradisional bekerja pada ranah yang berbeda, satu untuk tubuh, satu untuk jiwa, dan keduanya dipandang sama penting. Tidak ada tuntutan untuk memilih. Bagi masyarakat Mentawai, kesehatan selalu melibatkan dua dunia yang berjalan bersama tanpa saling membatalkan. Puskesmas yang menangani fisik dan sikerei yang menghubungkan mereka dengan roh penjaga keseimbangan hidup.

Kehidupan berdampingan juga tampak dalam kebiasaan makan babi di kalangan Muslim Mentawai. Babi bagi mereka bukan sekadar makanan, tetapi bagian dari budaya, ekonomi rumah tangga, dan ritual adat. Karena itu, meskipun mereka telah memeluk Islam, banyak yang tetap mengonsumsi babi

dalam pesta adat, memeliharanya di hulu desa, atau menjualnya untuk keperluan ritual. Identitas keagamaan dan tradisi leluhur hidup sejalan, tanpa perlu dipertentangkan secara keras. Mereka menjalankan ibadah Islam, namun tetap merawat posisi sentral babi yang telah menyatu dengan kehidupan sehari-hari.

Bentuk hubungan yang berjalan berdampingan ini semakin jelas terlihat dalam ranah etika. Agama dunia (Islam, Kristen, maupun Katolik) membawa aturan moral yang terstruktur, sementara Arat Sabulungan mengajarkan nilai melalui *keikei* (pantangan), relasi dengan hutan, dan tata hidup bersama. Ketika kedua sistem ini bertemu, masyarakat tidak memilih salah satu. Mereka menjalankan aturan agama ketika berada di gereja atau masjid, namun tetap menjaga pantangan ketika membuka ladang, melahirkan, atau melakukan ritual penyembuhan. Dua sumber moralitas hidup di ruang yang berbeda tetapi saling menguatkan, tanpa saling menguasai.

Di Mentawai, hidup berdampingan bukanlah sesuatu yang dipaksakan, melainkan pilihan yang lahir dari pengalaman panjang dan kebijaksanaan. Dua keyakinan bisa berjalan bersama tanpa saling meniadakan. Identitas dapat tumbuh justru ketika terbuka untuk berbagi ruang dan perbedaan tidak selalu berarti pertentangan. Inilah cara masyarakat Mentawai menjaga keseimbangan. Membiarkan dua ajaran bertemu tanpa menguasai, dan tetap menjadi diri mereka sendiri dalam dunia yang selalu berubah.

ARAT SABULUNGAN DAN NEGARA

Kolonialisme dan Penataan Agama

Pada masa kolonial Belanda, Arat Sabulungan tidak pernah dipandang sebagai agama dalam pengertian yang dihargai negara. Arat Sabulungan ditempatkan dalam kategori adat bahkan sering kali dilabeli sebagai kepercayaan primitif yang dianggap tidak memiliki struktur, aturan, atau ajaran yang layak disebut agama. Pandangan kolonial ini lahir dari kacamata Eropa yang membawa definisinya sendiri tentang apa itu agama. Agama didefinisikan harus ada kitab suci tertulis, nabi atau pendiri, tempat ibadah yang jelas, dan lembaga keagamaan yang teratur. Di luar itu, sesuatu tidak dianggap sebagai agama, melainkan sekadar praktik budaya yang boleh ada, tetapi harus dikendalikan (Hakiki, 2011; Maarif, 2017).

Arat Sabulungan dengan ritual-ritualnya yang menyatu dengan hutan, roh-roh leluhur, tarian sikerei, dan filosofi yang hidup dalam keseharian masyarakat, tidak cocok dengan definisi yang disiapkan oleh kolonial. Karena tidak memiliki kitab suci,

tidak memiliki lembaga formal, dan tidak memiliki bangunan ibadah yang dianggap resmi. Arat Sabulungan langsung ditempatkan sebagai kepercayaan kelas dua, sesuatu yang boleh dibiarkan hidup, tetapi tidak pantas mendapat pengakuan setara dengan agama.

Dari sinilah penataan agama dimulai. Pemerintah kolonial menjalankan dua strategi besar yang kelak membentuk pola relasi negara terhadap agama-agama leluhur di seluruh wilayah jajahan. Pertama, kolonial membuka pintu lebar-lebar bagi misi Kristen dan Katolik. Para misionaris diberi ruang dan dukungan untuk mendirikan sekolah, rumah sakit, dan pusat-pusat pelayanan yang menjadi sarana efektif dalam penyebaran agama. Mereka dipandang sebagai agen peradaban, pembawa pendidikan, kesehatan, dan nilai moral yang dianggap lebih tinggi daripada agama leluhur. Dalam cara pandang kolonial, semakin banyak orang Mentawai memeluk agama dunia, semakin maju pula masyarakat tersebut.

Kedua, kolonial memandang agama leluhur sebagai hambatan bagi proyek modernisasi. Arat Sabulungan dianggap tidak mendorong masyarakat untuk meninggalkan kebiasaan primitif, tidak mempercepat proses pendidikan, dan tidak mengarahkan masyarakat pada pola hidup yang sesuai dengan logika kolonial. Karena itu, agama leluhur ini perlahan-lahan ditekan, diarahkan, atau dikelola agar tidak mengganggu misi besar memperadabkan masyarakat.

Relasi kuasa ini membentuk pola yang sangat kuat. Agama dunia dianggap membawa kemajuan, sedangkan agama leluhur dianggap sebagai beban masa lalu. Meskipun Indonesia kemudian merdeka, cara pandang hierarkis ini tidak hilang begitu saja. Negara Indonesia mewarisi sebagian besar prinsip penataan agama kolonial, terutama dalam hal pendefinisian agama yang sangat sempit, pemberian legitimasi kepada agama tertentu, serta pengabaian terhadap agama leluhur. Apa yang terjadi di masa kolonial bukan hanya sejarah lama yang sudah selesai, melainkan menjadi fondasi cara negara memandang Arat Sabulungan hingga puluhan tahun setelah Indonesia berdiri. Sebuah warisan pengaturan agama yang terus membentuk kehidupan spiritual masyarakat Mentawai di masa kini.

Awal Indonesia Merdeka

Setelah Indonesia merdeka, negara mulai membangun fondasi administrasi dan ideologi nasional. Salah satu aspek yang dianggap penting adalah penataan agama. Negara dengan semangat modernisasi, berusaha mengatur agama warganya agar sesuai dengan kategori agama yang telah diakui. Di Mentawai, upaya penataan ini mencapai puncaknya pada tahun 1954, melalui sebuah peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Rapat Tiga Agama.

Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan No. 167/PM/1954. SK ini secara eksplisit bertujuan memberantas kepercayaan/agama yang tidak sesuai dengan pembangunan masyarakat modern (Mulhadi, 2008). Dalam kategori itu, Arat Sabulungan ditempatkan sebagai sasaran utama. Negara menilai bahwa agama leluhur ini tidak dapat mendorong masyarakat menuju kemajuan, sehingga harus ditinggalkan. SK tersebut menjadi dasar hukum bagi pelarangan ritual, pembatasan kegiatan adat, dan pengawasan ketat terhadap masyarakat. Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini jauh dari sekadar instruksi administratif. Aparat sering kali menggunakan pendekatan yang keras, intimidasi, ancaman, dan tindakan represif untuk memastikan masyarakat mematuhi kebijakan negara.

Rapat Tiga Agama diadakan dengan tujuan yang tampak sederhana dalam dokumen resmi. Memberikan arahan kepada masyarakat Mentawai agar memilih salah satu agama yang dianggap sah oleh negara. Namun di balik bahasa administratif itu, tersembunyi pandangan negara tentang agama mana yang layak dianggap agama, dan mana yang harus ditinggalkan. Arat Sabulungan, agama leluhur yang telah hidup jauh sebelum Indonesia berdiri, dianggap tidak memenuhi kriteria agama modern. Rapat Tiga Agama di Mentawai menjadi awal dari fase panjang tekanan yang dialami masyarakat Mentawai (Mulhadi, 2008; Wahyuni et al., 2024). Masyarakat dipaksa memilih satu dari dua agama resmi yang tersedia saat itu, Islam atau Kristen.

Pilihan itu jarang datang dari hati, lebih sering lahir dari ketakutan akan konsekuensi jika tetap mempertahankan Arat Sabulungan. Pelarangan ini mengubah peta spiritual Mentawai secara drastis. Ritual yang biasanya dilakukan secara terbuka di uma dengan tarian, nyanyian, dan doa-doa kepada roh leluhur, kini harus dilakukan secara diam-diam, sembunyi-sembunyi, bahkan kadang hanya dalam ingatan para tetua.

Dampak SK 167/1954 tidak berhenti pada pelarangan ritual. Pemerintah kemudian melakukan program pemindahan paksa masyarakat dari kampung-kampung tradisional ke pemukiman baru yang disebut Barasi. Alasan resminya adalah modernisasi dan pemerataan pembangunan, tetapi pemindahan ini juga memiliki maksud lain untuk mengawasi masyarakat agar lebih mudah dipengaruhi oleh pendidikan dan agama resmi.

Dalam proses ini, uma yang menjadi pusat kehidupan sosial dan spiritual dianggap sebagai simbol dari masa lalu yang tidak lagi sesuai dengan proyek pembangunan. Banyak uma dibongkar bahkan dibakar bersama benda-benda keramat di dalamnya. Di dalam api yang menyala, bukan hanya kayu dan hiasan adat yang hilang, tetapi juga ruang sakral tempat masyarakat Mentawai merayakan hidup dan menjaga hubungan dengan leluhur.

sikerei yang selama ini menjadi penjaga hubungan manusia dengan roh, ditempatkan dalam posisi paling rentan.

Mereka dicap sebagai pelaku praktik terlarang, dianggap menghambat modernisasi, dan karenanya menjadi target pengawasan. Ada sikerei yang dipaksa melepaskan perannya, ada yang diintimidasi, dan tidak sedikit yang ditangkap atau dipaksa melakukan pekerjaan berat sebagai hukuman.

Bagi masyarakat, ini adalah periode yang meninggalkan luka panjang. Sejumlah cerita turun-temurun masih tersimpan dalam ingatan para tetua. Bagaimana anak-anak harus menyembunyikan benda-benda adat agar tidak dirampas, bagaimana ritual dilakukan dengan pintu dan jendela tertutup rapat, bagaimana suara langkah kaki aparat dapat mengubah suasana kampung menjadi sunyi dalam sekejap. Trauma itu menempel dalam tubuh dan pikiran generasi yang mengalami langsung penindasan itu, lalu diwariskan kepada anak-cucu sebagai cerita kewaspadaan dan kehati-hatian.

Pemerintah mungkin bermaksud memodernisasi Mentawai, namun dalam prosesnya, negara mencabut akar identitas spiritual masyarakat. Sesuatu yang tidak bisa begitu saja digantikan oleh agama dunia atau sistem administrasi yang dibawa dari luar. Yang tersisa adalah ingatan menyakitkan tentang bagaimana negara pernah hadir bukan sebagai pelindung, tetapi sebagai kekuatan yang merusak rumah, keyakinan, dan martabat sebuah komunitas.

Orde Lama dan Orde Baru

Tekanan terhadap Arat Sabulungan tidak berhenti pada masa awal Indonesia merdeka. Ketika Indonesia memasuki akhir Orde Lama dan awal Orde Baru, hubungan antara masyarakat Mentawai dan negara justru semakin rumit. Jika pada awal kemerdekaan tekanan dilakukan secara langsung, melalui razia, pembakaran uma, dan pemaksaan berpindah agama, maka pada masa Orde Lama dan Orde Baru tekanan itu dilembagakan secara lebih rapi dan sistematis. Negara membangun struktur pengawasan yang memberi batasan jelas. Mana yang dianggap agama dan mana yang tidak.

Salah satu wajah paling nyata dari pengawasan itu adalah hadirnya Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM), lembaga negara yang dibentuk untuk mengawasi aliran-aliran kepercayaan (Maarif, 2017; Sihombing, 2008). Kehadiran PAKEM membuat Arat Sabulungan tidak lagi hanya menjadi urusan masyarakat adat, tetapi masuk ke dalam radar negara. Segala sesuatu yang tidak termasuk dalam enam agama resmi dicatat, diselidiki, dan dalam beberapa kasus dicurigai sebagai ancaman terhadap ketertiban nasional. Dalam kategori pemerintah, Arat Sabulungan tidak pernah dilihat sebagai agama. Arat Sabulungan dimasukkan ke dalam aliran kepercayaan, sebuah istilah yang mengandung nuansa kecurigaan sekaligus penolakan. Konsekuensinya, ritual-ritual adat dipantau dan dibatasi. Para sikerei diawasi secara ketat.

Kegiatan penyembuhan, tarian dalam ritual, hingga penggunaan benda-benda keramat dapat sewaktu-waktu dianggap sebagai praktik yang tidak sesuai dengan kebijakan negara.

Situasi ini diperburuk oleh politik pendefinisian agama yang sangat sempit pada masa Orde Baru. Negara menetapkan bahwa suatu ajaran hanya bisa disebut agama jika memiliki kitab suci, nabi atau pembawa wahyu, lembaga organisasi, tempat ibadah yang jelas, dan ritual yang teratur (Findi, 2017). Arat Sabulungan yang hidup dalam ingatan lisan, dalam hutan sebagai ruang sakral, serta dalam hubungan manusia dengan roh-roh leluhur, tidak memenuhi kriteria tersebut. Arat Sabulungan tidak memiliki kitab suci dalam bentuk buku. Arat Sabulungan tidak mengenal struktur lembaga formal dan tidak mendefinisikan dirinya melalui bangunan ibadah yang permanen. Karena itu, negara menempatkannya bukan sebagai agama, tetapi sebagai adat, sesuatu yang boleh dipertahankan sebagai simbol budaya, tetapi tidak memiliki kedudukan hukum sebagai keyakinan yang sah.

Pendefinisian administratif ini membawa konsekuensi yang sangat konkret bagi masyarakat Mentawai. Ketika negara mulai mewajibkan setiap warga negara untuk memilih salah satu agama resmi dalam KTP, masyarakat Mentawai terpaksa masuk ke dalam kategorisasi yang tidak mereka pilih. Tanpa KTP, seseorang tidak bisa mendaftar sekolah, menerima layanan kesehatan, mengurus pernikahan di mata negara, atau

mengakses berbagai layanan publik lain. Banyak keluarga akhirnya memilih agama resmi bukan sebagai pernyataan iman, tetapi sebagai strategi bertahan hidup. Dengan demikian, lahirlah dua identitas yang berjalan berdampingan. Identitas resmi yang dicatat di KTP, dan identitas spiritual yang tetap dijalankan di uma.

Walaupun identitas administratif masyarakat Mentawai berubah, kehidupan Arat Sabulungan tetap berlangsung. Di ruang privat dan komunitas, praktik-praktik Arat Sabulungan tidak pernah benar-benar hilang. Ritual penyembuhan tetap dilakukan oleh para sikerei, terutama ketika sakit dianggap memiliki dimensi spiritual. Pantangan keikei tetap dihormati dalam berbagai momen penting seperti kelahiran, kematian, pembangunan uma, hingga penyelesaian konflik sosial. Banyak keluarga yang secara administratif beragama Islam atau Kristen tetap melaksanakan ritual Arat Sabulungan yang telah diwariskan dari leluhur mereka. Bahkan di desa-desa sepanjang aliran Sungai Rereiket, praktik Arat Sabulungan masih bertahan dengan intensitas berbeda di setiap desa.

Di sinilah kehidupan masyarakat Mentawai pada masa Orde Baru menemukan bentuknya, hidup dalam dua dunia yang terus mereka negosiasikan. Mereka belajar berbicara dalam bahasa negara ketika berhadapan dengan birokrasi, tetapi tetap bernafas dengan nilai-nilai Arat Sabulungan dalam ruang keluarga dan komunitas. Identitas resmi memberi mereka akses

terhadap fasilitas publik, sementara identitas leluhur memberi mereka makna, arah, dan hubungan dengan roh-roh yang menjaga keseimbangan hidup.

Pada akhirnya, masa Orde Lama hingga Orde Baru meninggalkan jejak panjang dalam ingatan masyarakat Mentawai. Jejak tentang bagaimana sebuah keyakinan dapat ditekan melalui aturan, definisi, dan administrasi, tanpa pernah benar-benar bisa dihapus dari kehidupan orang Mentawai yang menjadikannya fondasi moral dan spiritual mereka.

Era Reformasi

Memasuki era Reformasi, hubungan antara negara dan penganut agama leluhur di seluruh Indonesia, termasuk masyarakat Mentawai, tidak lagi sama seperti pada masa Orde Baru. Runtuhnya rezim Orde Baru membuka ruang bagi banyak perubahan. Kebebasan berpendapat, peninjauan kembali kebijakan diskriminatif, dan gerakan-gerakan masyarakat adat yang mulai menuntut hak spiritual serta kultural mereka. Namun perubahan besar itu tidak serta-merta menghadirkan kelegaan penuh bagi Arat Sabulungan. Jalan menuju rekognisi lebih mirip belokan berliku ketimbang garis lurus. Ada harapan yang muncul, tetapi bersamaan dengan itu juga ada hambatan baru yang tidak kalah rumit.

Harapan pertama hadir melalui Undang-Undang Administrasi Kependudukan 2006 yang untuk pertama kalinya

membuka kemungkinan nyata bagi penganut kepercayaan untuk dicatat secara administratif (Maarif, 2017). Kolom agama pada KTP tidak lagi wajib diisi oleh salah satu dari enam agama resmi. Warga yang tidak menganut agama mana pun dapat mengosongkannya. Bagi komunitas adat di berbagai wilayah Indonesia, ini merupakan pintu kecil yang mulai membuka diri.

Namun pintu kecil itu tidak otomatis berubah menjadi jalan yang lebar. Realitas lapangan jauh lebih lamban dan berliku dibandingkan tulisan indah dalam lembar undang-undang. Banyak aparat di daerah tetap meminta warga untuk memilih agama resmi agar proses administrasi lebih mudah. Ada petugas yang menolak pencatatan pernikahan penghayat kepercayaan karena tidak ada kolomnya. Bahkan ketika seseorang mencoba mengosongkan kolom agama, ia masih berhadapan dengan stigma atau penolakan dalam mengurus layanan publik.

Di Mentawai, undang-undang ini memberi sedikit napas lega. Setidaknya membuka kemungkinan bagi masyarakat untuk membicarakan Arat Sabulungan secara lebih terbuka. Tetapi persoalannya tidak berhenti pada aturan negara. Tantangan terbesar justru terletak pada birokrasi yang tidak seragam, minimnya sosialisasi hukum, dan cara pandang sebagian pegawai pemerintahan yang masih melihat agama leluhur sebagai sesuatu yang belum pantas diakui.

Titik terang yang lebih jelas muncul pada tahun 2016, ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan 97/PUU-XIV/2016. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik, negara diwajibkan mengakui penghayat kepercayaan secara setara dengan pemeluk agama resmi. Putusan ini menegaskan bahwa kolom agama di KTP harus mencerminkan identitas spiritual warga, termasuk kepercayaan lokal atau agama leluhur, dan bahwa semua layanan negara, pendidikan, kesehatan, pernikahan, dan kependudukan wajib dipenuhi kepada semua warga negara tanpa diskriminasi (Maarif, 2017).

Bagi penghayat Arat Sabulungan, putusan MK ini bagaikan cahaya yang menembus hutan yang lama diselimuti kabut. Selama puluhan tahun mereka harus menyembunyikan identitas spiritualnya demi kebutuhan administratif. Kini, secara hukum, mereka tidak perlu lagi menyamar sebagai penganut agama lain untuk mendapatkan hak-hak dasar.

Namun sebagaimana banyak kebijakan progresif di Indonesia, perubahan di atas kertas tidak serta-merta mengubah kehidupan sehari-hari. Tantangan baru segera muncul di lapangan. Banyak layanan publik masih meminta warga untuk memilih salah satu agama resmi karena petugas belum memahami aturan baru. Pendidikan agama untuk anak-anak penghayat tidak tersedia, sehingga sekolah-sekolah masih memasukkan mereka ke dalam kelas agama lain. Pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan di beberapa daerah tetap

sulit dilakukan. Bahkan Arat Sabulungan masih dianggap sebagai tidak cocok menjadi agama, menunjukkan bahwa stigma lama belum hilang dari cara pandang negara.

Era Reformasi memang membuka peluang bagi rekognisi, tetapi juga memperlihatkan bahwa rekognisi bukan hanya urusan kebijakan. Proses panjang yang membutuhkan perubahan cara pandang, pemahaman, dan keberanian masyarakat untuk menyuarakan identitasnya. Hingga hari ini, Arat Sabulungan masih berada di tengah perjuangan antara aturan yang menjanjikan kesetaraan dan realitas sosial yang belum sepenuhnya siap menerima keberagaman agama yang lebih luas.

Bertahan di Tengah Aturan dan Larangan

Hubungan antara Arat Sabulungan dan negara bukanlah hubungan yang datar atau sederhana. Hubungannya menyerupai aliran sungai yang panjang, kadang tenang, kadang berkelok tajam, kadang terjal dan memaksa siapa pun yang berada di alirannya untuk berpegangan agar tidak terseret arus. Sepanjang sejarah Indonesia, Arat Sabulungan bersentuhan dengan berbagai bentuk kekuasaan, mulai dari kolonial Belanda, pemerintah awal Republik, rezim Orde Lama dan Orde Baru yang sangat sentralistik, hingga negara pasca Reformasi. Setiap periode membawa cara pandang baru tentang apa itu agama,

mana keyakinan yang pantas diakui, dan bagaimana negara seharusnya menata kehidupan keagamaan warganya.

Dalam proses panjang itu, Arat Sabulungan sering kali berada di posisi yang tidak menguntungkan. Pada satu masa dianggap sebagai adat primitif yang perlu diarahkan, pada masa lain dicap sebagai kepercayaan terlarang yang harus dihapus, dan pada masa berikutnya hanya diberi ruang kecil sebagai tradisi budaya bukan sebagai agama yang hidup. Berbagai regulasi dan kebijakan negara, mulai dari klasifikasi agama, mekanisme pencatatan sipil, hingga pengawasan terhadap aliran kepercayaan, telah membentuk cara masyarakat memandang Arat Sabulungan, sekaligus memaksa penghayatnya untuk menyesuaikan diri dalam diam.

Karena itulah perjalanan Arat Sabulungan tidak hanya berisi kisah spiritual, tetapi juga kisah politik. Arat Sabulungan mengalami penyingkiran, pelarangan, pembongkaran ruang ritual, pemindahan paksa, hingga tekanan administratif yang memaksa untuk mengadopsi identitas agama resmi demi bertahan hidup. Namun di tengah semua tekanan itu, Arat Sabulungan tidak hilang. Arat Sabulungan menepi di sela-sela hutan, di dapur rumah, di balik lantunan doa sikerei, di dalam pantangan keikei, dan di tubuh para penghayatnya yang menjaga nilai-nilai leluhur meski identitas resminya telah berubah.

Rekognisi yang mulai muncul pada era Reformasi bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba atau diberikan secara cuma-cuma oleh negara. Melainkan rekognisi yang lahir dari perjalanan panjang penuh pergulatan, dari generasi yang hidup dalam ketakutan, dari mereka yang harus melihat uma dibakar, dari anak-anak yang tumbuh tanpa identitas agama leluhur di KTP-nya, hingga dari para tetua yang terus menjalankan ritual meski harus dilakukan di bawah bayang-bayang larangan. Setiap kemajuan kecil yang didapat hari ini merupakan hasil ketegangan yang dialami masyarakat Mentawai selama berpuluh-puluh tahun, sekaligus bukti bahwa agama leluhur tidak mudah dipadamkan.

Karena itu, ketika membicarakan hubungan Arat Sabulungan dan negara, sesungguhnya sedang membicarakan hubungan antara kekuasaan dan martabat, antara regulasi dan kehidupan nyata, antara ruang administrasi dan ruang spiritual. Di titik-titik perjumpaan itulah terlihat bagaimana sebuah agama leluhur berjuang untuk tetap diakui. Bukan sebagai sisa masa lalu, tetapi sebagai bagian sah dari kehidupan masyarakat yang masih terus berkembang hingga hari ini.

REKOGNISI INTERSUBJEKTIF ARAT SABULUNGAN DI MENTAWAI

Rekognisi sebagai Proses yang Terus Bergerak

Rekognisi tidak pernah tumbuh dari ruang hampa. Rekognisi selalu lahir dari perjumpaan, dari tatapan yang saling mengakui, dari percakapan yang berlangsung berulang-ulang, dari keberanian sebuah komunitas untuk melihat dirinya sendiri sembari memberi ruang bagi orang lain melihat mereka apa adanya. Dalam banyak masyarakat adat, rekognisi sering kali bergerak jauh lebih dalam daripada sekadar aturan negara atau penetapan formal. Hidup dalam relasi, dalam tindakan sehari-hari, dalam cara masyarakat saling menghormati dan merawat satu sama lain.

Begitu pula dengan rekognisi Arat Sabulungan di Mentawai. Pengakuan terhadap agama leluhur ini tidak hanya berkaitan dengan perubahan kebijakan administratif seperti

kolom KTP atau status hukum para penghayat. Rekognisi yang sesungguhnya tumbuh dari cara masyarakat Mentawai yang terus menyimpan, merawat, dan menegosiasikan nilai-nilai Arat Sabulungan dalam kehidupan bersama. Rekognisi ini terjalin dalam relasi sehari-hari antara keluarga, para tetua adat, sikerei sebagai pemegang otoritas spiritual, pemuka agama dunia, hingga aparat desa yang mengatur tata kehidupan masyarakat.

Dalam keseharian, rekognisi itu terlihat dalam hal-hal yang mungkin tampak sederhana. Anak-anak yang masih dibawa kepada sikerei ketika mengalami sakit tertentu, kepala desa yang menempatkan kembali ruang ritual dalam perencanaan tata desa, atau tokoh agama yang menghormati ritual adat sebagai bagian dari identitas kolektif. Di titik-titik kecil seperti itulah, rekognisi tumbuh bukan sebagai teori, tetapi sebagai praktik sosial yang nyata.

Bagian ini akan menelusuri bagaimana proses rekognisi itu bekerja dalam tiga ranah utama (Honneth, 2020). Pertama, ranah cinta, ranah hubungan emosional dan penghargaan. Di mana pengakuan diri, rasa bangga terhadap identitas leluhur, dan penghargaan terhadap peran sikerei menjadi bagian penting dari perubahan sosial Mentawai. Di sini, rekognisi bergerak melalui hubungan keluarga, pola hidup masyarakat, dan cara mereka mendidik anak-anak. Kedua, ranah hukum, yaitu ranah di mana pengakuan diformalkan dalam aturan-aturan lokal seperti Peraturan Desa, penataan zonasi desa, serta

mekanisme penyelesaian konflik berbasis adat. Melalui ranah ini, rekognisi memperoleh bentuk yang lebih kokoh, bukan hanya sebagai rasa hormat, tetapi sebagai hak yang dijamin oleh aturan dan sistem pemerintahan desa. Ketiga, ranah solidaritas yang menempatkan rekognisi sebagai proses membangun kebersamaan. Di sini terlihat bagaimana uma kembali dihidupkan sebagai ruang publik, bagaimana punen diselenggarakan dengan melibatkan warga lintas suku dan agama, serta bagaimana relasi harmonis antara sikerei, tokoh agama dunia, dan aparat pemerintah menjadi fondasi kehidupan sosial yang inklusif.

Dengan memetakan ketiga ranah ini, bagian ini menunjukkan bahwa rekognisi terhadap Arat Sabulungan bukan sekadar diterima atau ditolak, diakui atau tidak diakui, melainkan proses konstruksi subjektivitas kolektif, suatu proses panjang di mana masyarakat Mentawai membangun jati diri bersama, membentuk rasa “kita,” dan merumuskan kembali siapa mereka dalam dunia yang terus berubah. Rekognisi dalam pengertian ini adalah proses yang bergerak. Tidak selesai, tidak statis, dan tidak menunggu keputusan dari pihak luar. Hidup dalam cara masyarakat Mentawai terus menegosiasikan identitas mereka, merawat warisan spiritual mereka, dan membangun masa depan yang mereka inginkan bersama.

Rekognisi yang Bertumbuh dari Keluarga dan Ingatan Kolektif

Ranah cinta adalah ruang paling dasar tempat rekognisi bermula. Ini adalah tempat di mana seseorang pertama kali belajar untuk merasa dihargai, dihormati, dan diakui oleh orang-orang terdekatnya. Dalam konteks Mentawai, ranah cinta menjadi lahan subur bagi tumbuhnya kembali penghargaan terhadap Arat Sabulungan, terutama melalui relasi yang terjalin di dalam keluarga, antara generasi tua dan muda, serta melalui figur sentral budaya Mentawai yakni para sikerei.

Pada masa lalu, khususnya pada era Orde Baru, menjadi sikerei bukanlah sesuatu yang mudah. Keberadaan mereka sering berada dalam tekanan, terutama karena definisi agama yang sempit dan pemaksaan identitas administratif negara membuat praktik Arat Sabulungan masuk ke wilayah yang dianggap tidak resmi bahkan terlarang. Banyak sikerei memilih berjalan dalam bayang-bayang, menyembunyikan gelang, tato, dan simbol-simbol yang menandai keahlian mereka. Mereka tidak berhenti menjadi sikerei, tetapi harus membungkus identitas mereka rapat-rapat demi menghindari stigma dan pengawasan.

Namun, lanskap sosial itu perlahan berubah. Di desa seperti Matotonan, masyarakat kembali memandang sikerei sebagai penjaga keseimbangan dunia. Mereka dihormati karena pengetahuan yang dalam tentang tubuh, hutan, dan roh. Mereka

dipanggil bukan hanya untuk menyembuhkan, tetapi juga untuk memberi arah untuk hidup dalam keseimbangan. Kehadiran sikerei menjadi bukti bahwa Arat Sabulungan tidak pernah benar-benar hilang. Arat Sabulungan tetap hidup dalam pengalaman intersubjektif sehari-hari, dalam cara masyarakat saling berbagi cerita, memberi hormat, dan merawat hubungan dengan roh leluhur.

Perubahan ini juga tercermin dalam pola pemukiman masyarakat Mentawai. Dalam beberapa dekade terakhir, banyak keluarga memindahkan tempat tinggal dari hulu sungai ke wilayah barasi, wilayah hilir yang lebih dekat dengan sekolah, puskesmas, dan layanan perhubungan. Dari luar, perpindahan ini tampak seperti langkah menuju modernitas. Namun sejatinya, perpindahan itu adalah bagian dari proses adaptasi, bukan pelepasan identitas. Orang Mentawai tidak meninggalkan hulu karena hendak menjauh dari Arat Sabulungan. Mereka membawa itu bersama mereka, membawanya ke tempat baru, ke rumah baru, dan ke ritme hidup yang lebih modern.

Di barasi, Arat Sabulungan hadir dalam bentuk yang lebih halus namun tetap kuat. Ritual besar mungkin tidak sesering dulu, tetapi penghormatan terhadap alam tetap diajarkan. Pantangan-pantangan tetap dijalankan. Relasi spiritual terhadap hutan tetap dimaknai dalam keseharian, meski jaraknya tidak sedekat ketika tinggal di hulu. Nilai-nilai Arat

Sabulungan menjadi sesuatu yang fleksibel, dapat menyesuaikan diri tanpa kehilangan inti maknanya.

Di tengah perubahan ini, peran sikerei dalam pendidikan anak-anak menjadi sangat penting. Pendidikan di Mentawai tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi di tengah hutan, di tepi sungai, atau di ladang. Seorang sikerei bisa menjadi guru pertama yang memperkenalkan anak-anak pada bahasa alam, mengajarkan mereka membedakan jejak binatang, mengenali daun obat, atau membaca arah angin. Dalam proses itu, anak-anak belajar untuk melihat hutan bukan sebagai sumber daya belaka, tetapi sebagai ruang hidup yang penuh roh dan harus dihormati.

Melalui cara ini, anak-anak Mentawai tumbuh dengan identitas yang lebih utuh. Mereka memahami bahwa pengetahuan leluhur bukan warisan yang memalukan, tetapi sumber kebijaksanaan yang membuat mereka istimewa. Inilah bentuk rekognisi paling awal, yang tumbuh bukan dari kebijakan atau dokumen resmi, tetapi dari cinta, dari hubungan hangat antara orang tua dan anak, antara sikerei dan murid kecilnya, antara generasi tua yang bercerita dan generasi muda yang mendengarkan.

Ranah cinta menunjukkan bahwa rekognisi tidak selalu dimulai dari negara atau lembaga formal. Rekognisi bermula dari ruang intim, dari uma yang menyimpan cerita, dari pandangan hormat anak kepada leluhurnya, dan dari keyakinan bahwa identitas yang diwariskan tidak perlu disembunyikan.

Dari sinilah rekognisi Arat Sabulungan menemukan pijakan pertamanya, pijakan yang paling hangat dan paling menentukan.

Rekognisi Menjelma Menjadi Aturan yang Melindungi

Ranah cinta bekerja secara intim melalui hubungan emosional dalam keluarga dan komunitas dan ranah hukum bergerak ke tingkat yang lebih formal. Di sinilah pengakuan diberi wujud yang jelas melalui kebijakan, regulasi, dan keputusan bersama yang memastikan Arat Sabulungan tidak hanya dihormati secara personal, tetapi juga dilindungi secara institusional. Bagi masyarakat Mentawai, ranah hukum menjadi cara penting untuk menjaga keberlanjutan Arat Sabulungan di tengah dunia yang berubah cepat.

Salah satu contoh paling menonjol hadir di desa Matotonan. Desa ini menjadi tempat di mana rekognisi atas Arat Sabulungan diterjemahkan ke dalam aturan tertulis melalui sebuah peraturan desa. Peraturan ini bukan sekadar dokumen administratif, namun bentuk kesepakatan kolektif yang menempatkan cara hidup masyarakat Mentawai sebagai fondasi utama tata kehidupan masyarakat. Dalam peraturan tersebut, Arat Sabulungan tidak lagi dilihat sebatas adat budaya yang sifatnya dekoratif atau seremonial. Sebaliknya, Arat Sabulungan dipahami sebagai sistem nilai yang menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan. Bagaimana membuka lahan, bagaimana berburu dengan penuh hormat, bagaimana menjalankan ritual

penyembuhan, dan bagaimana menjaga keseimbangan dengan alam.

Dengan pengakuan ini, sikerei memperoleh posisi yang jauh lebih jelas. Mereka tidak lagi dipandang hanya sebagai figur tradisional, melainkan sebagai pemangku pengetahuan lokal yang memiliki legitimasi hukum. Ketika seorang sikerei memimpin ritual penyembuhan atau memberi izin untuk menebang pohon tertentu, ia melakukannya tidak hanya berdasarkan kewenangan spiritual, tetapi juga berdasarkan pengakuan formal dari masyarakat dan pemerintah desa. Ini adalah bentuk rekognisi yang sangat penting. Ketika negara pada tingkat lokal memberi ruang bagi otoritas agama leluhur untuk ikut mengatur kehidupan bersama.

Ranah hukum ini juga hadir melalui penataan ruang desa. Di Matotonan, pemerintah desa bersama masyarakat menyusun zonasi pemukiman, perkebunan, dan peternakan secara hati-hati. Penataan ini tidak sekadar mengikuti logika pembangunan modern, tetapi berakar pada cara berpikir ekologis yang telah diwariskan oleh Arat Sabulungan. Area hutan, misalnya, tetap dipertahankan sebagai ruang sakral, tempat berdiamnya roh, tempat sikerei mendapatkan daun obat, dan tempat masyarakat menjaga keseimbangan alam. Perkebunan dan ladang ditempatkan dengan mempertimbangkan aliran sungai, kemampuan tanah, dan pantangan tertentu. Dengan cara ini,

hukum modern justru menjadi jembatan yang memperkuat praktik ekologis tradisional, bukan menggantikannya.

Ketika konflik muncul, entah terkait batas ladang, pelanggaran pantangan, atau pertengkaran keluarga, masyarakat Matotonan tidak serta-merta membawa persoalan itu ke kantor kepolisian. Mereka lebih sering memulai dengan mekanisme adat. Forum musyawarah adat yang biasanya dipimpin oleh tetua desa menjadi ruang di mana persoalan dibicarakan secara terbuka. Nilai-nilai Arat Sabulungan berfungsi sebagai rujukan moral. Harmoni lebih penting daripada kemenangan. Hubungan antar keluarga lebih berharga daripada hukuman. Keseimbangan alam harus dijaga melalui tindakan yang bertanggung jawab.

Ranah hukum ini memperlihatkan bahwa rekognisi formal sesungguhnya dapat menjadi sahabat bagi adat, bukan ancaman. Ketika aturan ditulis berdasarkan nilai leluhur dan disepakati bersama, hukum tidak lagi terasa memaksa. Hukum atau aturan menjadi ruang aman bagi tradisi untuk tumbuh dan berkembang. Bagi masyarakat Mentawai, ini berarti bahwa Arat Sabulungan tidak hanya hidup dalam cerita dan ritual, tetapi juga dalam lembaga, kebijakan, dan keputusan yang mengatur kehidupan sehari-hari mereka sebagai warga desa.

Rekognisi Tumbuh Melalui Kebersamaan

Ranah cinta berakar pada hubungan intim dalam keluarga. Ranah hukum bekerja melalui aturan-aturan formal. Selajutnya ranah solidaritas hadir dalam ruang sosial, di tempat orang saling bertemu, bekerja sama, dan berbagi kehidupan sehari-hari. Di Mentawai, solidaritas menjadi wujud rekognisi yang paling hangat, paling hidup, dan paling mudah dirasakan. Tidak selalu muncul dalam bentuk simbol-simbol besar, melainkan lewat kebiasaan kecil seperti duduk bersama di uma, menghadiri punen sebagai tetangga, atau saling mendukung ketika terjadi musibah. Dari sinilah pengakuan terhadap Arat Sabulungan memperoleh pijakannya yang paling kuat dari hubungan antar manusia yang terjalin setara.

Salah satu ruang paling penting dalam ranah ini adalah uma, rumah adat besar yang bagi masyarakat Mentawai bukan sekadar bangunan. uma adalah dunia sosial itu sendiri, tempat di mana keputusan diambil, konflik diselesaikan, anak-anak belajar sopan santun, dan para tetua berbagi cerita tentang asal-usul keluarga. Setelah masa-masa kelam ketika banyak uma dibongkar atau dibakar akibat kebijakan negara, revitalisasi uma pada saat ini menjadi tanda munculnya rekognisi baru. Ketika sebuah uma dibangun kembali, bukan hanya kayu dan atap yang ditegakkan, tetapi juga martabat kolektif yang sempat diruntuhkan.

Di dalam uma, masyarakat kembali berkumpul tanpa memandang agama apa yang tertera di KTP mereka. Laki-laki dan perempuan, tua dan muda, pendatang dan warga asli, semua memiliki ruangnya. uma menjadi tempat di mana Arat Sabulungan tumbuh secara alami, bukan karena dipaksakan, tetapi karena dirawat melalui kebiasaan hidup bersama. Revitalisasi uma bukan hanya proyek pelestarian budaya, tetapi juga proyek rekognisi sosial yang memastikan bahwa ruang tempat Arat Sabulungan itu hidup tetap terjaga dan dihormati.

Solidaritas semakin tampak ketika masyarakat mengadakan punen, perayaan adat Mentawai yang biasanya berlangsung sebagai ungkapan syukur atau untuk menandai perubahan penting dalam kehidupan keluarga. Di masa lalu punen lebih sering berlangsung dalam lingkup komunitas adat, kini banyak desa menyelenggarakannya sebagai perayaan bersama yang melibatkan seluruh warga, bahkan tamu dari luar. Dalam suasana itu, punen berubah menjadi ruang inklusi, tempat di mana berbagai identitas bertemu sebagai sesama warga Mentawai, bukan sebagai penganut agama tertentu. Ritual adat tidak lagi dipandang sebagai wilayah eksklusif penghayat Arat Sabulungan, tetapi sebagai warisan budaya bersama yang layak dirayakan oleh siapa pun yang hidup di tanah itu. Solidaritas tumbuh bukan karena keseragaman keyakinan, tetapi karena rasa kebersamaan yang dibangun dari pengalaman hidup sehari-hari.

Selain uma dan punen, ranah solidaritas juga terlihat dalam hubungan baru antara sikerei, tokoh agama dunia, dan aparat pemerintah desa. Di banyak tempat, ketiganya kini menjadi mitra yang saling menghargai. Dulu seorang sikerei sering dipinggirkan karena dianggap mempraktikkan kepercayaan yang tidak sesuai dengan agama dunia, kini posisinya mulai dipahami sebagai penjaga pengetahuan tradisional yang sangat dibutuhkan. Tokoh agama Islam atau Katolik kerap berdiskusi dengan sikerei ketika desa merencanakan pembukaan lahan, atau ketika terjadi peristiwa alam yang dianggap memerlukan pertimbangan adat.

Aparat pemerintah desa pun banyak mengandalkan pengetahuan sikerei mengenai hutan, daun obat, dan tata ruang ekologis. Ketika konflik muncul, mereka duduk bersama untuk mencari jalan damai, bukan dengan saling menegasikan keyakinan, melainkan dengan menghormati peran masing-masing. Hubungan ini menciptakan keseimbangan sosial yang unik. Tradisi tidak menyingkirkan agama dunia. Agama dunia tidak menggantikan Arat Sabulungan. Keduanya hidup berdampingan, saling mengisi, dan saling meneguhkan.

Melalui interaksi sehari-hari semacam inilah rekognisi dalam ranah solidaritas tumbuh. Tidak ditentukan oleh aturan tertulis, tetapi oleh kebiasaan hidup bersama oleh masyarakat Mentawai yang memandang satu sama lain sebagai sesama manusia yang bermartabat. Dalam solidaritas, rekognisi bukan

hanya tentang menerima perbedaan, tetapi tentang merayakannya sebagai kekayaan bersama. Dari sinilah terlihat bahwa Arat Sabulungan tetap hidup bukan hanya karena dipertahankan dalam ritual, tetapi karena dihormati dalam jaringan hubungan sosial yang hangat dan egaliter.

Rekognisi sebagai Konstruksi Subjektivitas Kolektif

Melihat kembali tiga ranah rekognisi (cinta, hukum, dan solidaritas) akan tampak jelas bahwa rekognisi terhadap Arat Sabulungan tidak lahir dari satu sumber tunggal. Tidak datang semata-mata dari negara, tidak pula hanya dari komunitas adat, tetapi tumbuh dari perjumpaan terus-menerus antara keduanya. Rekognisi Arat Sabulungan di Mentawai adalah hasil dari dialog panjang yang dijalani seluruh elemen masyarakat seperti keluarga, sikerei, perangkat desa, tokoh agama, hingga para pemuda yang kini hidup dalam arus perubahan yang semakin cepat.

Dalam proses ini, rekognisi bukan lagi sekadar persetujuan atau label administratif. Rekognisi bekerja pada tingkat yang lebih dalam. Pada cara masyarakat memandang diri mereka sendiri, cara mereka menilai warisan leluhur, dan cara mereka berusaha menempatkan identitas Arat Sabulungan dalam lanskap kehidupan modern. Rekognisi ini bersifat timbal balik, masyarakat membutuhkan legitimasi dari negara, tetapi pada saat yang sama mereka juga membangun legitimasi dari dalam,

melalui praktik-praktik sehari-hari dan hubungan sosial yang mereka jalin.

Di titik inilah muncul apa yang dapat disebut sebagai subjektivitas kolektif. Ini bukan hanya soal identitas individu, tetapi kesadaran bersama tentang siapa mereka sebagai sebuah komunitas. Subjektivitas kolektif memberi bentuk pada cara masyarakat Mentawai menjelaskan kebijaksanaan leluhur kepada anak-anak mereka, menentukan arah pembangunan desa, atau menimbang dampak perubahan yang datang dari luar. Dengan kata lain, rekognisi menjadi alat untuk meneguhkan “kami” sebagai sebuah ruang batin yang diperkuat oleh sejarah, pengalaman, dan hubungan emosional.

Tentu saja proses ini tidak selalu mulus. Ada perbedaan pandangan antar generasi, ada ketegangan antara tradisi dan modernitas, ada tarik-menarik antara keinginan untuk mempertahankan identitas adat dan kebutuhan praktis untuk mengikuti aturan negara. Namun justru di dalam ketegangan itulah Arat Sabulungan menemukan bentuknya yang baru. Arat Sabulungan tidak membeku sebagai ajaran leluhur masa lalu, tetapi berkembang sebagai nilai hidup yang mampu berdialog dengan zaman.

Dalam pengertian ini, rekognisi bukanlah akhir, melainkan perjalanan yang terus bergerak. Bukan hanya tentang melindungi warisan budaya yang sudah ada, tetapi juga tentang merawat masa depan agar warisan itu tetap relevan. Ketika

anak-anak mengenali daun-daun obat dari sikerei, ketika pemerintah desa mengatur zonasi dengan mempertimbangkan ruang sakral, ketika punen dilaksanakan melibatkan seluruh warga tanpa memandang agama, semuanya menunjukkan bahwa rekognisi telah meresap ke dalam cara hidup masyarakat.

Rekognisi intersubjektif Arat Sabulungan di Mentawai merupakan sebuah upaya bersama untuk menjaga agar nilai-nilai leluhur tetap bernapas di antara perubahan, memastikan bahwa Arat Sabulungan tidak hanya diakui di atas kertas, tetapi dihidupi dalam tindakan. Arat Sabulungan hidup dalam cara orang bertutur, saling menghormati, menjaga hutan, dan memandang dunia. Inilah rekognisi yang tidak sekadar melihat ke masa lalu, tetapi juga menata ruang bagi masa depan, di mana Arat Sabulungan tetap menjadi sumber makna, panduan moral, dan akar identitas kolektif masyarakat Mentawai.

PENUTUP

Menutup perjalanan Arat Sabulungan dalam buku ini tidak berarti menutup cerita tentang Arat Sabulungan. Justru di titik inilah, mulai melihat dengan lebih jernih bagaimana agama leluhur orang Mentawai bergerak, berubah, dan dinegosiasikan di tengah berbagai arus zaman. Apa yang tampak sebagai ajaran leluhur sesungguhnya terus diperbarui oleh para pelakunya, oleh sikerei yang menjaga hubungan dengan alam, oleh keluarga-keluarga yang menanamkan nilai leluhur kepada anak-anak mereka, oleh tokoh agama dan aparat desa yang belajar merawat ruang publik bersama, serta oleh seluruh masyarakat Mentawai yang secara sadar atau tidak terus menghidupi warisan spiritualnya.

Buku ini menunjukkan bahwa rekognisi tidak pernah sekadar urusan administrasi, bukan hanya baris pada dokumen negara, dan bukan pula pengakuan formal dari pihak luar. Rekognisi adalah ruang perjumpaan yang menjadi arena di mana masyarakat Mentawai memandang dirinya sendiri dan mengizinkan diri mereka untuk dilihat oleh lain. Lahir dari

interaksi sehari-hari, dari cara orang memanggil sikerei dengan hormat, dari cara kepala desa menetapkan zonasi desa, dari cara punen diselenggarakan, dan dari cara anak-anak dibawa ke hutan untuk belajar mengenali jejak, daun, serta ritme alam.

Melalui rangkaian kisah, percakapan, dan observasi lapangan, dapat dipahami bahwa rekognisi Arat Sabulungan memiliki tiga wajah yang saling berkaitan. Pertama, rekognisi pada ranah cinta, ranah emosional dan afektif tempat penghargaan diri tumbuh kembali. Kedua, rekognisi pada ranah hukum, legitimasi formal yang memberi ruang bagi Arat Sabulungan untuk hidup berdampingan dengan tata kelola modern. Ketiga, rekognisi pada ranah solidaritas, kebersamaan sosial yang terus dipelihara melalui ritual, ruang publik, dan relasi yang setara antara pemangku otoritas.

Rekognisi bukanlah proses yang selesai. Rekognisi juga rentan, rapuh, dan selalu berada di persimpangan. Tantangan hadir dari berbagai arah. Tekanan ekonomi yang memaksa sebagian masyarakat menerima masuknya perusahaan kayu. Penetrasi agama-agama dunia yang kadang menempatkan agama leluhur sebagai lain yang harus ditinggalkan, serta dinamika internal komunitas yang terus bernegosiasi antara modernitas dan warisan leluhur. Di tengah semua itu, Arat Sabulungan tetap bertahan bukan karena dilindungi oleh kekuatan magis, tetapi karena dihidupi oleh manusia, oleh mereka yang percaya bahwa hubungan harmonis antara manusia, alam, dan roh adalah fondasi kehidupan.

Arah baru rekognisi Arat Sabulungan tidak ditentukan oleh negara semata. Rekognisi Arat Sabulungan ditentukan oleh masyarakat Mentawai sendiri, oleh keputusan mereka untuk menjaga hutan, menghormati sikerei, memelihara ruang adat, serta merawat hubungan antarwarga tanpa mengabaikan keberagaman agama. Peran negara, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil tetap penting, terutama dalam memastikan bahwa rekognisi tidak berhenti pada simbol, tetapi diterjemahkan ke dalam kebijakan, pendidikan, dan program yang menghormati suara masyarakat adat. Namun fondasi utamanya selalu ada di tangan komunitas, di dalam cara mereka memaknai diri, menjaga martabat, dan menghidupkan nilai-nilai yang mereka warisi.

Pada akhirnya, rekognisi adalah pernyataan keberlanjutan. Arat Sabulungan tidak hanya penting bagi masa lalu, tetapi juga bagi masa depan. Arat Sabulungan bukan sekadar arsip budaya, melainkan sumber etika ekologis, spiritualitas, dan solidaritas sosial yang relevan bagi dunia yang semakin terlepas dari akar-akar ekologisnya. Rekognisi terhadap Arat Sabulungan bukanlah hadiah dari pihak luar, tetapi cermin tempat masyarakat Mentawai membayangkan dirinya dan dari sanalah masa depan mereka dibangun, selangkah demi selangkah, dengan penuh rasa hormat dan harapan.

DAFTAR PUSAKA

- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Depok: Rajawali Press.
- Ardhanari, M., Viphindrartin, S., & Nugrohadhi, G. E. (2021). Phenomenology Study of the Socio-Economic Strengthening of the Mentawai Indigenous Peoples. *Media Trend*, 16(1), 129–141.
- Arifin, F. P. (2019). *Teori Rekognisi Axel Honneth*. Misionaris Xaverian.
<http://fraterxaverian.org/blog/2019/04/09/infinite-identities-sexual-orientation/>
- Delfi, M. (2012). Sipuisilam Dalam Selimut Arat Sabulungan Penganut Islam Mentawai Di Siberut. *Al-Ulum*, 12(1), 1–34.
- Delfi, M. (2013). Islam and Arat Sabulungan in Mentawai. *Al-Jami'ah*, 51(2), 475–499.
- Delfi, M. (2017). Local Belief System, Tatouage, Tradition and Adaptation in Mentawai. *Borderless Communities & Nation With Borders Challenges of Globalisation*, 899–911.
- Febrianti. (2021). *Arat Sabulungan dan Gempuran Agama di Mentawai*. Jurnalistravel.Com.

<https://www.jurnalistravel.com/arar-sabulungan-dan-gempuran-agama-di-mentawai/>

- Findi, M. (2017). *Politik Rekognisi Pada Penghayat dan Penganut Aliran Kepercayaan*. Yayasan Satunama Yogyakarta.
<https://satunama.org/4032/politik-rekognisi-pada-penghayat-dan-penganut-aliran-kepercayaan/>
- Glossanto, K. (2019). *Sabulungan Dalam Tegangan Identitas Budaya : Kajian atas Religi Orang Mentawai di Siberut Selatan*. Universitas Sanata Dharma.
- Hakiki, K. M. (2011). Politik Identitas Agama Lokal: Studi Kasus Aliran Kebatinan. *Al-Adyan*, XI(1), 159–174.
- Hanani, S., & Nelmaya. (2022). Ecological Ethics in The Theological Teaching of Arat Sabulungan in Mentawai Island Indonesia. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 43(1), 102–107.
- Honneth, A. (2020). *Recognition - A Chapter in the History of European Ideias*. Columbia: Cambridge University Press.
- II, J. P. (1985). *Slavorum Apostoli*. Vatican.Va.
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_19850602_slavorum-apostoli.html
- Krissandi, A. D. S., Widanarto, S., & Utami, W. E. (2019). Posthumanisme Masyarakat Mentawai. *Indonesia Di*

Tengah Pascahumanisme: Merumuskan Model Humanisme Baru, 9–15.

Kurniawan, R. (2019). Harmonisasi Masyarakat Mentawai. *Al-Qalb : Jurnal Psikologi Islam*, 9(2), 111–118.

Maarif, S. (2012). *Dimensions of Religious Practice The Ammatoans of Sulawesi, Indonesia*. United States: Arizona State University.

Maarif, S. (2017). *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama di Indonesia*. Yogyakarta: CRCS.

Markus. (2016). *Perayaan Jubileum 100 Tahun Gereja Kristen Protestan di Mentawai*. Persekutuan Gereja-Gereja Di Indonesia. <https://pgi.or.id/perayaan-jubileum-100-tahun-gereja-kristen-protestan-di-mentawai/>

Meitikasari, D., & Drianus, O. (2021). Rekognisi Axel Honneth : Gramatika Moral Bagi Defisit Rasionalitas Beragama. *Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 6(1), 24–47.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. London: SAGE publications Ltd.

Mulhadi. (2008). Kepercayaan Tradisional “Arat Sabulungan” dan Penghapusannya di Mentawai. *Journal Equality*, 13(1), 50–65.

Nelmaya, & Deswalantri. (2021). The Problem of Da’wah and Islamization in The Mentawai Islands. *Jurnal*

Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan Dan Kemasyarakatan, 5(1), 35–44.

- Panjaitan, B. S. P. (2017). Understanding Tsunami Hazard Knowledge and Preparedness: Before and After the 2010 Tsunami in Mentawai (Indonesia). In *University of Canterbury*. University of Canterbury.
- Pariyatman, M. H., Santoso, P., & Madjid, A. (2022). Respek dan Rekognisi: Resolusi Konflik Wadas (Analisis Resolusi Konflik Wadas Dalam Perspektif Teori Rekognisi Axel Honneth). *Jurnal Komunikatio*, 8(2), 116–127.
- Prabowo, R. A. (2019). Politik Rekognisi Axel Honneth: Relevansinya terhadap Jaminan Kesetaraan dalam Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 75–88.
- Rahmat, I. (2021). Jaminan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 11(11), 1–33.
- Reeves, G. (1999). History and 'Mentawai': Colonialism, Scholarship and Identity in the Rereiket, West Indonesia. *The Australian Journal of Anthropology*, 10(1), 34–55.
- Ropi, I. (2017). *Religion and Regulation in Indonesia*. Singapore: PalgraveMacmillan.
- Rozi, S., & Taufik, Z. (2020). Adaptation of Religion and Local Wisdom in Global Environmental Issues in Indonesia.

- Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 4(3), 191–203.
- Rudito, B. (1993). *Masyarakat Mentawai di Sebelah Barat Sumatera* (Koentjaraningrat (ed.)). PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rudito, B. (1999). *Masyarakat dan Kebudayaan Suku Bangsa Mentawai*. Laboratorium Antropologi “Mentawai” Fakultas I Ilmu Politik.
- Rukiyanto, B. A. (2019). Inculturation in The Catholic Church in Indonesia. *Journal of Asian Orientation in Theology*, 1(1), 31–48.
- Runesi, S. T. (2015). Pengakuan sebagai Gramatika Intersubjektif Menurut Axel Honneth. *MELINTAS*, 30(3), 323.
- Satoko, M. S., & X, I. P. (2023). Katekese Inkulturasi Tentang Makna Budaya “ Arat Sabulungan ” dalam Masyarakat Suku Mentawai. *Jurnal Pelayanan Pastoral*, 4(2), 79–87.
- Sihombing, U. P. (2008). *Menggugat Bakor Pakem: Kajian Hukum Terhadap Pengawasan Agama dan Kepercayaan di Indonesia*. Jakarta Selatan: Indonesian Legal Resource Center (ILRC).
- Siritoitet, M. R., & Zalukhu, A. (2025). Akulturasi Injil dengan Nilai-Nilai Arat Sabulungan di Masyarakat Mentawai

- Bumi Sikerei. *CARAKA: Jurnal Teologi Biblika Dan Praktika*, 6(2), 177–196.
- Tatubeket, R. M., Agustina, A., & Efi, A. (2019). Peran Musik Tuddukat dalam Ritual Arat Sabulungan di Kabupaten Mentawai. *Jurnal Sosiologi Agama: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama Dan Perubahan Sosial*, 13(1), 75–105.
- Tulius, J. (2013). Family Stories Oral Tradition, Memories of The Past, and Contemporary Conflicts Over Land in Mentawai – Indonesia. *Wacana: Journal of The Humanities of Indonesia*, 15(1), 180–188.
- Wahyuni, D. (2024). *Agama-Agama Lokal di Indonesia*. Klaten: Nasmedia.
- Wahyuni, D., Busro, Sabna, A., & Karista, K. (2023). Resistensi Arat Sabulungan terhadap Modernisasi: Analisis Kritis atas Novel Burung Kayu Karya Niduparas Erlang. *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial*, 6(1), 79–88.
- Wahyuni, D., Octavia, I. A., Karista, K., Sabna, A., & Martalia, M. (2025). The Religious Cosmology of Indigenous Communities for Maintaining Ecological Balance in the Mentawai Islands, Indonesia. *Millah: Journal of Religious Studies*, 24(1), 137–172.
- Wahyuni, D., Pratama, F. N., Lestari, J., Sabna, A., & Martalia, M. (2024). Beyond Coexistence: Intersecting Realms of

- Faith and Policy in Mentawai, Indonesia. *Khazanah Sosial*, 6(2), 294–306.
- Wahyuni, D., & Sabna, A. (2025). Re-Establishing Ecological Relations in the Worldview of Mentawai Indigenous Religion. *Studia Sosia Religia*, 8(2), 118–127.
- Wirman, E. P., Ilham, M., Ananda, A., Fatimah, S., & Reflinaldi. (2021). The Cultural Syncretic Strategy of The Muslim Minority: A Case in the Mentawai Islands-Indonesia. *The Internasional Journal of Languange and Cultural*, 3(1), 83–90.
- Yulia, R., Zulfa, & Kaksim. (2019). *Education Values of Arat Sabulungan Tradition in Matotonan Mentawai*. 178(1), 178–181.
- Yulia, R., Zulfa, & Naldi, H. (2018). Improving the Government Policy on the Arat Sabulungan Tradition in Mentawai Islands. *TAWARIKH: Journal of Historical Studies*, 10(1), 59–74.
- Zalman, M. (2018). *Dampak Kebijakan Pemerintah SK NO. 167/PM/1954 Terhadap Perkembangan Islam Di Mentawai*. Jakarta: Fakultas Adab & Humaniora UIN Syarif Hidayatullah.

Buku ini mengajak pembaca menelusuri perjalanan Arat Sabulungan, agama leluhur masyarakat Mentawai yang hidup di persimpangan antara spiritualitas, adat, dan kekuasaan negara. Melalui kisah-kisah lapangan, percakapan dengan Sikerei, aparat desa, dan warga, buku ini memperlihatkan bagaimana Arat Sabulungan bukan sekadar agama leluhur, melainkan cara hidup yang terus dinegosiasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Mentawai. Dengan menggunakan pendekatan relasional, agama dipahami sebagai cara manusia membangun hubungan dengan sesama manusia, alam, dan dunia spiritual. Dari perspektif ini, Arat Sabulungan tampil sebagai sistem nilai yang merajut kosmologi, etika lingkungan, ritual keseimbangan, dan tata kehidupan sosial masyarakat Mentawai.

Buku ini juga merekam perjumpaan Arat Sabulungan dengan agama-agama dunia (Islam, Kristen, dan Katolik) serta dengan negara, mulai dari masa kolonial, Rapat Tiga Agama 1954 masa Orde Lama, Orde Baru dengan politik penyeragaman agama, hingga era Reformasi yang membuka ruang rekognisi namun masih menyisakan berbagai bentuk diskriminasi. Agama leluhur masyarakat Mentawai ini tidak dipotret sebagai korban pasif, melainkan sebagai tradisi yang bernegosiasi, beradaptasi, dan bertahan melalui strategi kultural “menepi” sebuah pilihan taktis dan cara strategis yang diam-diam menyelamatkan Arat Sabulungan pada masa-masa ketika tidak boleh diucapkan.

Buku ini menawarkan arah baru rekognisi Arat Sabulungan. Sebuah ajakan untuk melihat agama leluhur bukan sebagai sisa masa lalu, melainkan sebagai sumber etika ekologis, kebijaksanaan sosial, dan harapan masa depan. Buku ini ditujukan bagi pembaca umum, akademisi, pembuat kebijakan, dan siapa pun yang tertarik memahami bagaimana masyarakat adat merawat spiritualitasnya di tengah dunia yang terus berubah.